



**LKJiP**

**DINAS SOSIAL**

**KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

**TH. 2025**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam mengelola pembangunan infrastruktur daerah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial ini telah diupayakan sebaik mungkin, namun demikian tentunya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki dan ditingkatkan pada tahun yang akan datang. Semoga Laporan Kinerja ini telah dapat mencerminkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2025.

Liwa, 26 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**ALIYURDIN, S.Sos., M.H**

Pembina TK I/IV.b

NIP. 197211201994021002

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Pada dasarnya Laporan Kinerja merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dengan jumlah keseluruhan sebanyak 1 (satu) sasaran strategis, 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) Subkegiatan dengan realisasi fisik rata-rata 100% dan keuangan 96.61%. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Dinas Sosial Tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	:	<i>i-i</i>
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	:	<i>i-ii</i>
DAFTAR ISI.....	:	<i>i-iii</i>
DAFTAR TABEL.....	:	<i>i-iv</i>
DAFTAR GRAFIK.....	:	<i>i-v</i>
DAFTAR GAMBAR.....	:	<i>i-vi</i>
BAB I. PENDAHULUAN.....	:	<i>I-1</i>
BAB II. PERENCANAAN KINERJA .....	:	<i>II-1</i>
BAB III. KAPASITAS ORGANISASI.....	:	<i>III-1</i>
BAB IV. AKUNTABILITAS KINERJA.....	:	<i>IV-1</i>
BAB V. PENUTUP.....	:	<i>V-1</i>
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat.....	: II-3
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	: II-7
Tabel 2.3 Pagu Program kegiatan Subkegiatan Tahun 2025.....	: II-8
Tabel 2.4 Target Kinerja Tingkat Sasaran Strategis Tahun 2025.....	: II-9
Tabel 2.5 Target Kinerja Tingkat Program Tahun 2025.....	: II-10
Tabel. 3.1 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pangkat dan Golongan.....	: III-1
Tabel. 3.2 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	: III-1
Tabel . 3.3 Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Diklat Penjurangan.....	: III-2
Tabel.3.4 Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan).....	: III-2
Tabel 3.5 Pagu DPA Dinas Sosial tahun 2024 dan 2025.....	: III-3
Tabel 4.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	: IV-2
Tabel 4.2 Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025.....	: IV-5
Tabel 4.5 Pencapaian Kinerja SPM tahun 2025.....	: IV-7
Tabel 4.6 Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Lampung Barat dengan Provinsi Lampung tahun 2025.....	: IV-9
Tabel 4.7 Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Lampung Barat dengan Kabupaten Way Kanan tahun 2025.....	: IV-10
Tabel 4.8 Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025.....	: IV-12
Tabel 4.9 Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025..	: IV-17
Tabel 4.10 Rekap Kunjungan Masyarakat.....	: IV-19

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Grafik Flowchart Rehabilitasi Sosial tahun 2024	:	IV-5
Grafik 2 Realiasi anggaran tahun 2024	:	IV-16

## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1

STRUKTUR ORGANSASI..... : 1-6



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan mempertimbangkan keselarasan dengan tujuan dan





sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimitas sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Diterbitkannya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), membuat Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.



## **B. Tugas dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 04 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat mempunyai tugas dan kewajiban :

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Sosial mempunyai fungsi :

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini:

### **1. Kepala Dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang sosial;
- c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. pelaksanaan administrasi dinas dibidang sosial; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut diatas, Dinas Sosial mempunyai uraian tugas yaitu:



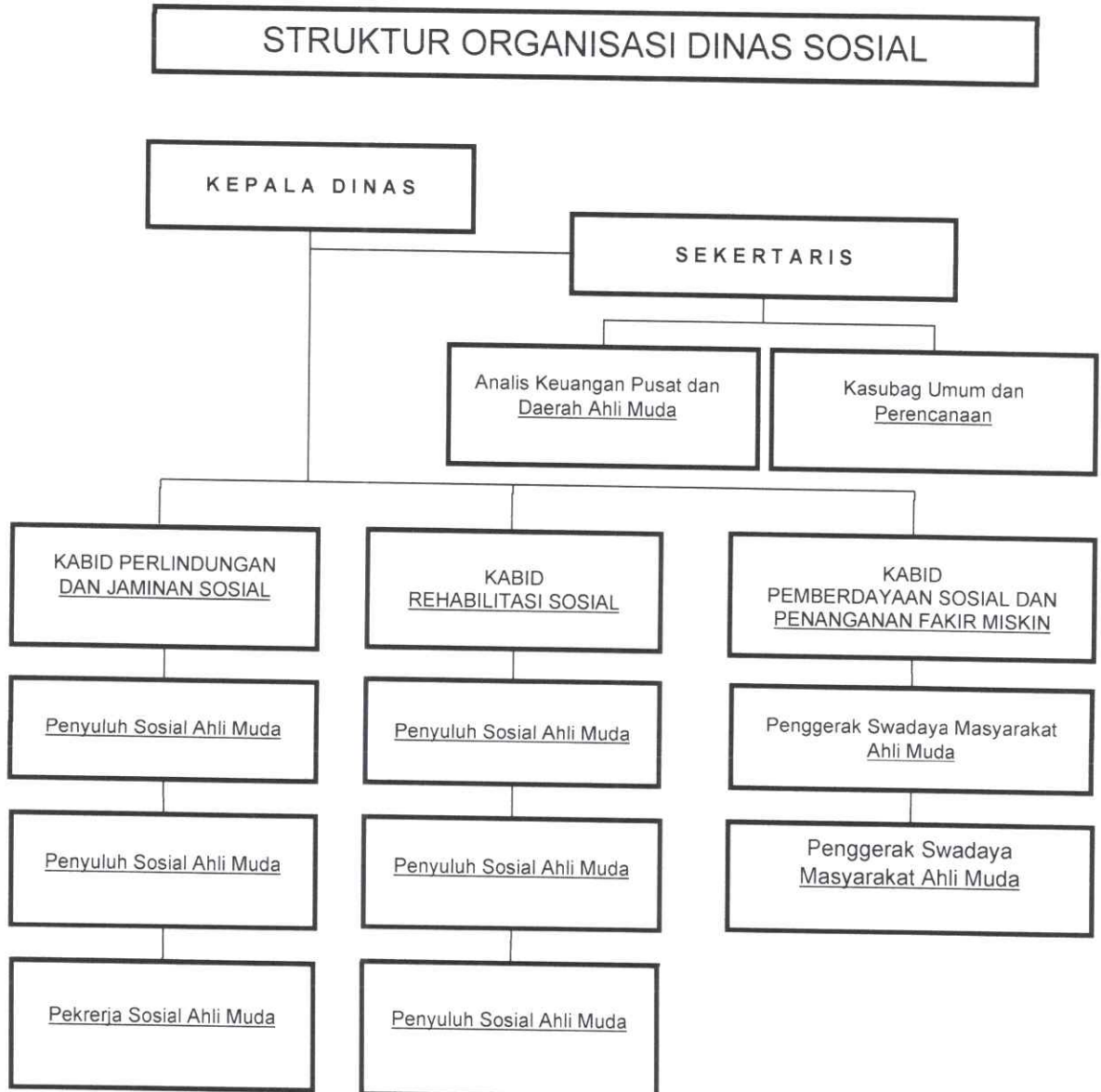
- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dilingkungan dinas sosial yang menjadi tugas dan kewenangannya;
- b. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan bidang sosial;
- c. merumuskan kebijakan teknis dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial;
- d. melaksanakan tugas dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, dibidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- g. melaksanakan kegiatan pemberdayaan terhadap kelompok usaha bersama baik sosial maupun ekonomi;
- h. meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan sosial bagi organisasi kepemudaan dan pekerjaan sosial masyarakat;
- i. melaksanakan pembinaan lembaga pemberdayaan dan pengembangan sosial;
- j. melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap organisasi sosial dan yayasan sosial;



- k. melaksanakan program kebijakan pemerintah pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah, dan pelaksanaan strategis penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial;
- l. membagi tugas kepada bawahan sekaligus memberikan petunjuk baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan permasalahan dan bidang masing-masing;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan;
- n. menilai prestasi kerja ASN dilingkup Dinas sosial berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam Penilaian Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara; dan
- o. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh pimpinan untuk kelancaran pelaksanaan tugas berdasarkan standar norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### C. Struktur Organisasi

Gambar 1  
Struktur Organisasi



### D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Peran Strategis Perangkat Daerah berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan



yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Sosial adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang Sosial yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, dimana pelayanan dasar bidang sosial adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial dan pemerintahan.

Penerapan SPM bidang Sosial dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar Pada Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota adalah:

1. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti skala kabupaten/kota;  
Indikatornya Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti
2. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Terlantar di dalam Panti Skala kabupaten/kota;  
Indikatornya Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti
3. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Skala kabupaten/kota;  
Indikatornya Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti



4. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;  
Indikatornya Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota. Indikatornya Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi Kebutuhannya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota

### **E. Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan mengingat dampaknya yang signifikan bagi masyarakat dimasa yang akan datang. Kondisi yang menjadi isu strategis adalah kondisi yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar, sehingga akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berkaitan dengan peran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dengan menggunakan metode FGD (*Focus Group Discussion*), maka isu strategis yang selalu menjadi pusat perhatian dan perbincangan, dapat didefinisikan sebagai berikut: **“Belum Optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan penanganan PPKS dan pencapaian SPM bidang Sosial”**

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut:



1. Meningkatnya kualitas cakupan pelayanan pemenuhan kesejahteraan sosial bagi PMKS melalui pemberian akses pendidikan dan kesehatan bagi penduduk miskin dan pelayanan kesejahteraan sosial (PKH, BPNT), peningkatan kualitas data kemiskinan, penanganan PPKS wajib sebagaimana SPM Permendagri No 59 Tahun 2021, pemberian jaminan perlindungan sosial, pemberdayaan dan rehabilitasi Sosial.
2. Peningkatan pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan masyarakat baik Pendamping PKH, PSKS, LKS, PSM, TAGANA.
3. Meningkatkan kinerja administratif dan penunjang kinerja pelayanan melalui peningkatan kualitas SDM, pemenuhan aset dan peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran.





## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

### **A. Rencana Strategis**

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat adalah suatu dokumen Perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 460/44/III.16/KPTS/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026. Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban PJ Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.



Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

### **1. Strategi dan Arah Kebijakan**

Strategi pada dasarnya lebih bersifat grand design (agenda), sebagai suatu cara atau pola yang dirancang untuk merespon isu strategis yang dihadapi dan/atau untuk mencapai, tujuan dan sasaran instansi. Dengan kata lain, strategi merupakan suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan, Dinas Sosial melaksanakan strategi dan arah kebijakan yang secara rinci tercantum pada tabel berikut ini:



Tabel 2.1  
Strategi dan arah Kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatnya PMKS Mandiri	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	Meningkatkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif	Penerapan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera, mencakup bantuan tunai bersyarat (BPNT dan PKH), pangan bernutrisi, peningkatan usaha keluarga.
		Mengembangkan penghidupan berkelanjutan bagi PMKS	Peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PMKS
			peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan akses atas usaha ekonomi produktif.
		Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat <i>marjinal</i>	Meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat <i>marjinal</i>
		Meningkatkan modal sosial dan peran kelembagaan sosial	pengembangan kepedulian sosial dan pranata gotong royong
pengembangan kompetensi dan ketersediaan tenaga kesejahteraan sosial			



Strategi peningkatan sistem perlindungan sosial yang komprehensif merupakan upaya melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terlindungi setidaknya kebutuhan dan hak dasarnya agar mampu menopang kehidupannya secara produktif. Hal ini dilakukan dengan menerapkan asistensi sosial terpadu berbasis keluarga dan siklus hidup melalui program keluarga produktif dan sejahtera, bantuan tunai bersyarat (BPNT dan PKH), pangan bernutrisi, peningkatan usaha keluarga.

Pengembangan penghidupan berkelanjutan merupakan strategi yang difokuskan pada peran aktif para pihak dan peningkatan kualitas pendampingan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat miskin dan rentan. Hal ini dilakukan melalui upaya peningkatan pelatihan dan pendampingan dalam rangka peningkatan kapasitas dan keterampilan PMKS dan peningkatan kerjasama yang melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan akses atas usaha ekonomi produktif. Peningkatan pemenuhan hak dasar dan inklusivitas penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal dilakukan dengan meningkatkan advokasi regulasi dan kebijakan di tingkat pusat dan daerah untuk pemenuhan hak dasar dan terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia dan kelompok masyarakat marjinal.

## **2. Program dan Kegiatan Pembangunan**

Program merupakan penjabaran kebijaksanaan yang merupakan kumpulan kegiatan nyata yang sistematis dan terpadu. Program dapat bersifat jangka panjang (5 tahunan), menengah (3 tahunan) dan jangka pendek (tahunan). Sedangkan kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa



Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Berdasarkan Renstra 2023-2026, maka Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat antara Lain:

### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Program ini memiliki 8 (delapan) Kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

### **2. Program Rehabilitasi Sosial**

Terdiri dari 2 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:



- 1) Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial
- 2) Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti

### **3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/kota

### **4. Program Penanganan Bencana**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota

### **5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan**

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

## **B. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan



yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 - 2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat  
Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan	Target (%)			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana)	83,91	87,82	91,73	95,64
5							

Pada tahun 2025 Dinas Sosial kabupaten Lampung Barat mengusulkan Anggaran Perubahan sehingga mengubah Pagu DPA



Murni yang semula Rp 5.437.489.817,- berkurang menjadi Rp 4.888.099.687, walaupun bertambah pagu akan tetapi **tidak** merubah Perjanjian Kinerja di Tingkat Kepala OPD. Berikut rincian pagu anggaran Dinas Sosial tahun 2025.





Tabel 2.  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) Tahun 2023-2026

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Penjelasan		Target				Definisi Operasional
				Formulasi/Rumus Perhitungan	Sumber Data	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	%	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar	Data PMKS	83,91%	87,82%	91,73%	95,64%	PMKS adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar (Permensos No 08 tahun 2012). Berdaya artinya berkekuatan; berkemampuan; bertenaga; kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak untuk mengatasi masalah



				panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana)						(KBBI). Penanganan PMKS di Kabupaten Lampung Barat dibatasi hanya 5 dari 26 Jenis PMKS yaitu: Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, Gelandangan Pengemis dan Penanganan Bagi Korban Bencana. Untuk Penanganan PMKS Berdaya yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Barat hanya sebatas penanganan pertama berupa bantuan alat bantu, permakanaan dan kebutuhan dasar korban bencana.
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.4  
Pagu Program dan kegiatan Tahun 2025

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU APBD 2025	APBD Pergeseran 2025	APBD Perubahan
<b>SOSIAL</b>	<b>5.437.489.817</b>	<b>4.718.574.817</b>	<b>4.888.099.687</b>
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>3.498.802.771</b>	<b>3.206.760.771</b>	<b>3.275.461.641</b>
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	68.703.000	38.575.000	53.639.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.760.722.771	2.760.722.771	2.752.435.641
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.275.000	8.545.000	8.545.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.161.000	13.441.000	13.366.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.928.000	127.349.000	201.098.000
Pengadaan Barang Milik Daerah	32.800.000	32.800.000	32.800.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	126.903.000	94.968.000	83.218.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	265.310.000	130.360.000	130.360.000
<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.524.882.000</b>	<b>1.175.041.000</b>	<b>1.262.175.500</b>
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	379.610.000	229.981.000	251.800.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.45.272.000	945.150.000	1.010.375.000
<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>104.400.000</b>	<b>55.288.000</b>	<b>55.288.000</b>
Pengelolaan Data fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/Kota	104.000.000	55.288.000	55.288.000
<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>104.000.000</b>	<b>150.635.000</b>	<b>164.325.000</b>
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	104.000.000	150.635.000	164.325.000
<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>178.955.000</b>	<b>130.850.046</b>	<b>130.850.046</b>



Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	178.955.000	130.850.046	130.850.046
---	-------------	-------------	-------------

### C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial tahun 2023 – 2026 yang dituangkan kedalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial berikut disampaikan Target Kinerja tersebut:

#### 1. Target Kinerja Tingkat Sasaran Strategis Tahun 2025

Tabel 2.5  
Target Kinerja Tingkat Sasaran Strategis Tahun 2025

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan	Target (%)			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana)	83,91	87,82	91,73	95,64
5							



## 2. Target Kinerja Tingkat Program

Tabel 2.6  
Target Kinerja Tingkat Program Tahun 2025

No	Program	Indikator Kinerja	Target
1	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.55%
2	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	58,65%
		Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,23%
		IKM	B
3	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100%
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	100%
		Persentase anak yatim dan kube miskin yang mendapatkan bantuan program perlindungan dan jaminan sosial	70,24%
5	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase komponen utama taman makam pahlawan	78.57%



### BAB III KAPASITAS ORGANISASI

#### A. Analisis Sumber Daya Manusia

Pegawai yang terdapat pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat seluruhnya berjumlah 37 orang dengan rincian Pegawai Negri Sipil berjumlah 27 orang dan Tenaga Lepas Sukarela (THLS) berjumlah 10 orang.

Tabel. 3.1  
Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Gol	Jumlah
1.	Pembina Tk I. / IV.c	1 Orang
2.	Pembina Tk I. / IV.b	1 Orang
3.	Pembina / IV.a	6 Orang
4.	Penata TK I / III.d	9 Orang
5.	Penata / III.c	1 Orang
6.	Penata Muda TK I / III.b	3 Orang
7.	Penata Muda / III.a	2 Orang
8.	Pengatur TK I / II.d	1 Orang
9.	Golongan IX	2 Orang
	<b>Jumlah</b>	<b>26 Orang</b>

Tabel. 3.2  
Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Strata Pendidikan	Jumlah
1	S-2	9 Orang
2	S-1	15 Orang
3	SLTA	2 Orang
	Jumlah	26 Orang



Tabel . 3.3  
Daftar Jumlah Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Jenis Diklat Penjenjangan	Jumlah
1	Diklat PIM II / Spamem	1 Orang
2	Diklat PIM III / Spama	2 Orang
3	Diklat PIM IV/ Adum	10 Orang
	Jumlah	12 rang

## B. Analisis Sarana dan Prasarana

Dinas Sosial adalah Dinas baru yang merupakan pemecahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2013 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Perlengkapan yang dimiliki antara lain:

Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan):

Tabel.3.4

Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan)

NO	URAIAN BARANG	JUMLAH
<b>A</b>	<b>TANAH</b>	
1	Taman Makam Pahlawan	2.000
2	Gedung Loka Bina Karya	1.419
<b>B</b>	<b>ALAT BESAR</b>	
1	Generator Set	1
2	Mesin Diesel	1
3	Generator Set	1
4	Pompa Air	1
5	Tali Karen Mental 12 Inc	1
6	Tali Keren Mental 8 Inc	1
7	Ge7nset	1
8	Tali 8Webing	4
9	Sit Body Harmest	2
10	Pull Body Hermest	2
11	Puley Singge	4
12	Puley Tendom	2
13	Tali Kurenmantel	2
14	Jaket Pelampung/Life Craft	14



15	Velbed	5
16	Valbed	3
<b>C</b>	<b>ALAT ANGKUT</b>	
1	Mini Bus	1
2	Perahu Karet	1
3	Mobil Dapur Umum	1
4	Mini Bus	1
5	Perahu Karet	2
6	Sepeda Motor	27
<b>D</b>	<b>ALAT PERTANIAN</b>	
1	Tangki Semprot Acu	1
<b>E</b>	<b>ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA</b>	
1	Absen Sidik Jari	1
2	Alamari Panjang	1
3	Alat Pendingin (AC)	1
4	Alat Penghancur Kertas	1
5	Almari Ganti	5
6	Almari Kayu	3
7	Apar 3 Kg Borneo Protek	3
8	Brankas	1
9	Buffet	1
10	CCTV	1
11	Dandang Besar	3
12	Dipan 1 Tingkat	8
13	Dipan 2 Tingkat	15
14	Dispenser	1
15	Filling Cabinet 4 Laci Sekertariat PKH	1
16	Filling Kabinet	12
17	Gambar Foto Bupati/Wakil	1
18	Gambar Foto Gubernur/Wakil	1
19	Gambar Foto Presiden/Wakil	1
20	Gorden	54
21	Gorden TMP Ukuran 2 x 2 M	4
22	Kalkulator	5
23	Karpet Gulung Polos	9
24	Kasur	36
25	Kompor Gas	3
26	Kompor Sepritus	2
27	Kursi 1 Biro	4
28	Kursi 1/2 Biro	7
29	Kursi Lipat	116
30	Kursi Plastik	133
31	Kursi Putar	8
32	Kursi Sofa	1
33	Kursi Tamu	1
34	Kursi Tamu Jati	1
35	Kursi Tamu Sudut	1





36	Lampu Hias TMP	4
37	Layar Proyektor	1
38	Lemari Arsif	4
39	Lemari Penyimpang Bufferstok	3
40	Meja 1 Biro	6
41	Meja 1/2 Biro	71
42	Meja Front Office Lobby	1
43	Meja Komputer	1
44	Meja Tulis	3
45	Mesin Babat Rumput	3
46	Mesin Ketik	3
47	Mesin Potong Rumput	2
48	Microphone	1
49	Papan Pengumuman	1
50	Pengadaan Almari Arsip	3
51	Plang Spanduk TMP	1
52	Proyektor	1
53	Ransel/ Tas Punggung	2
54	Smart TV	2
55	Stabilizer	2
56	Tangga Lipat	1
57	Televisi	1
58	Teralis Jendela	4
59	Teralis Pintu	1
60	Termos Nasi	5
61	U P S	3
62	Wajan Besar Stanlis	3
<b>F</b>	<b>ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR</b>	
1	Receiver Internet	1
2	Kamera Digital	1
3	Wireles	1
4	Tripod	1
5	Webcame	2
6	Speaker Aktif	1
7	Speaker Aktif Baretone	1
<b>G</b>	<b>KOMPUTER</b>	
1	Askendour	2
2	Computer	13
3	Computer All In One	3
4	Laptop	11
5	Printer	15
6	Printer Samsung	1
7	Safety Helmet	14
8	Tenda Pengungsi	1
9	Tenda Personil	2
10	Tenda Regu	2



11	Tri Anggle	2
<b>H</b>	<b>BANGUNAN GEDUNG</b>	
1	Bangunan Gedung Kantor	1
2	Bangunan Penunjang TMP	2
3	Bangunan Utama TMP	1
4	Gedung Bina Loka Karya	1
5	Nomenclatur TMP	1
6	Pelataran Parkir	1
7	Pembuatan Gedung Parkir	1
8	Perkerasan Halaman	1
9	Rumah Genset	1
10	Tangga dan Taman Makam Pahlawan	1
<b>I</b>	<b>MONUMEN</b>	
1	Monumen Tugu Pahlawan	1
<b>J</b>	<b>TUGU TITIK KUMPUL/PASTI</b>	
1	Bangunan Pagar	1
	<b>JALAN DAN JEMBATAN</b>	
1	Jalan Karya Bhakti TNI Kecamatan-Suoh	1
<b>K</b>	<b>BANGUNAN AIR</b>	
1	MCK	1
2	Sumur dengan Pompa	1
<b>L</b>	<b>INSTALASI</b>	
1	Instalasi Listrik	1
2	Jaringan Air	1
3	Saluran Air Bersih	1
4	Tempat Cuci Tangan	1

### C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat mengalami tiga kali Penetapan Pagu DPA yaitu DPA Murni, DPA Pergeseran dan DPA Perubahan. Berikut disampaikan pagu DPA tahun 2024 dan 2025

Tabel 3.5  
Pagu DPA Dinas Sosial tahun 2024 dan 2025

No	Pagu 2024	Murni 2025	Pergeseran 2025	Perubahan 2025
1	4.825.138.126	5.437.489.817	4.718.574.817	4.888.099.687

Berdasarkan tabel diatas terjadi kenaikan anggaran dari tahun 2024 ke 2025 sebesar 0,88%, akan tetapi pada bulan maret terjadi penurunan anggaran dari pagu APBD Murni ke APBD Perubahan sebesar 8,86%.



Penurunan anggaran di Dinas Sosial (Dinsos) pada tahun 2025 terjadi di tingkat pusat maupun daerah, dipicu oleh rekonstruksi anggaran, efisiensi belanja, serta penurunan dana transfer. Dampak penurunan ini mencakup pengurangan bantuan jaminan kesehatan, bantuan sosial (bansos) tunai, dan anggaran operasional untuk kelompok rentan, meskipun pemerintah berupaya tetap menjaga layanan prioritas.

Anggaran Dinas Sosial mengalami perubahan pada bulan September dengan persentase kenaikan sebesar 0,97% untuk memperkuat bansos, penanganan kemiskinan ekstrem (KUBE), dan pemberdayaan masyarakat, penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK), Assesment bantuan kemensos untuk disabilitas, lansia dan bantuan anak-anak, Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah, Penambahan Buffer Stock Bencana, serta pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.



---

## **BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA**

### **A. Capaian Kinerja**

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor 460/44/III.16/KPTS/2022 tanggal 24 April 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Lampung Barat. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:



Tabel 4.1  
Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Penjelasan/Alasan/Formulasi/Perhitungan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana)	%	91,73	92,51	100,85
		5				

Penentuan capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berdasarkan pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2023-2026, dengan formulasi perhitungan dari jumlah 5 (lima) indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi target pelayanan. Untuk pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2  
Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten  
Lampung Barat Tahun 2025

No	Indikator	Tahun 2024	Tahun 2025			
		Realisasi	Target	Target	Realisasi	Capaian
1	Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	260 orang	390 orang	390/665 = 58,65%	416/665 = 62,56%	106,67 %
2	Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	21 orang	28 orang	28/28 = 100%	28/28 = 100%	100%



3	Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	241 orang	241 orang	241/241 = 100%	241/241 = 100%	100%
4	Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	1 orang	1 orang	1/1= 100%	1/1= 100%	100%
5	Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana)	320 orang	344 orang	344/344 = 100%	344/344 = 100%	100%
	Total			458,65%	462,56%	506,67 %
	Hasil			91,73%	92,51%	100,85 %

Sumber: IKU Dinas Sosial Tahun 2025

Dari tabel tersebut dapat dilihat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 dapat terealisasi seluruhnya 100% dengan rincian penghitungan sebagai berikut:

Total penghitungan persentase 462,56% diperoleh dari penjumlahan seluruh persentase realisasi pada masing-masing indikator, yaitu:

1. Disabilitas Terlantar = 62,56%
2. Anak Terlantar = 100,00%
3. Lansia Terlantar = 100,00%
4. Gelandangan/Pengemis = 100,00%
5. Korban Bencana = 100,00

$$(62,56\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% = 462,56\%)$$

Untuk perhitungan rata-rata persentase (%) Nilai 92,51% merupakan rata-rata realisasi dari lima indikator yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

**Rata-rata = Total Persentase ÷ Jumlah Indikator**

Perhitungan:

$$462,56\% \div 5 \text{ indikator} = 92,51\%$$

Artinya, secara rata-rata tingkat realisasi indikator mencapai 92,51%.



Sedangkan untuk perhitungan total capaian sebesar 506,67% diperoleh dari penjumlahan capaian setiap indikator:

1. Disabilitas Terlantar = 106,67%
2. Anak Terlantar = 100,00%
3. Lansia Terlantar = 100,00%
4. Gelandangan/Pengemis = 100,00%
5. Korban Bencana = 100,00%

Perhitungan:

$$106,67\% + 100\% + 100\% + 100\% + 100\% = 506,67\%$$

Perhitungan rata-rata capaian

Nilai 100,85% merupakan rata-rata capaian kinerja dari lima indikator dengan rumus sebagai berikut:

**Rata-rata capaian = Total Capaian ÷ Jumlah Indikator**

Perhitungan:  $506,67\% \div 5 \text{ indikator} = 100,85\%$

Kesimpulan dari perhitungan tersebut diatas adalah rata-rata realisasi indikator adalah 92,51%. Sedangkan rata-rata capaian kinerja adalah 100,85%, yang berarti secara keseluruhan kinerja telah melampaui target yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah dalam meningkatkan keberdayaan PPKS di Kabupaten Lampung Barat diantaranya adalah:

**1. Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti.**

Penanganan penyandang disabilitas terlantar di luar panti merupakan salah satu bentuk pelayanan rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar



penyandang disabilitas yang mengalami keterbatasan ekonomi maupun sosial agar dapat menjalani kehidupan yang lebih layak tanpa harus tinggal di panti sosial.

Pelaksanaan penanganan dilakukan melalui beberapa bentuk kegiatan, antara lain pendataan dan verifikasi penyandang disabilitas terlantar, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar seperti sembako, alat bantu disabilitas, serta dukungan sosial lainnya. Selain itu juga dilakukan pendampingan sosial kepada penyandang disabilitas dan keluarganya agar mereka dapat memperoleh akses terhadap pelayanan sosial, kesehatan, dan program bantuan pemerintah lainnya.

Pada tahun 2025 pemerintah daerah menargetkan penanganan sebanyak 390 orang, dan realisasi yang dicapai mencapai 416 orang atau 106,67% dari target. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berjalan dengan baik bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah pekon/desa, kecamatan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), pendamping sosial, serta masyarakat. Dengan adanya sinergi tersebut, penyandang disabilitas terlantar dapat lebih cepat teridentifikasi dan mendapatkan pelayanan sosial yang dibutuhkan.

Data penerima bantuan untuk disabilitas diperoleh dari usulan keluarga langsung, data dari kecamatan bersumber dari kasi kesra kecamatan serta data dari puskesmas, ada juga masyarakat yang langsung datang mengajukan permohonan ke dinsos agar mendapatkan pelayanan rehabilitasi. Tahun 2025 rehabilitasi mental untuk ODGJ hanya 8 orang dikarenakan keterbatasan





anggaran serta berdasarkan kelengkapan berkas serta pernyataan dari pihak keluarga bahwa mereka akan bertanggungjawab penuh kepada penderita setelah proses rehab selam 6 bulan di yayasan akan melanjutkan perawatan dan pengawasan setelah dikembalikan ke keluarga.

Dinas Sosial mengadakan kerja sama dengan Yayasan Aulia Rahma Bandar Lampung sudah berjalan 5 tahun, dengan pertimbangan paket perawatan selama 8 bulan, ada beberapa yayasan serupa tetapi dengan tarif yang jauh lebih tinggi, lokasinya jauh dan hanya mampu melakukan perawatan hanya 1 bulan (RSJ).

Setelah selesai masa rehabilitasi, Dinas Sosial melakukan monitoring 2 (dua) kali dalam 1 (satu) untuk melihat kondisi pasien setelah rehabilitasi dan memastikan keluarga untuk terus melakukan pendampingan pemberian pengobatan lanjutan. Selain itu pihak Dinas Sosial menjalin komunikasi dengan keluarga pasien untuk terus mengupdate keadaan pasien itu sendiri

Selain bantuan pengobatan untuk disabilitas mental yang bersumber dari APBD, terdapat bantuan dari kementerian sosial Republik Indonesia, bantuan ini diusulkan dari keluarga, masyarakat melalui pekon ataupun kecamatan yang diusulkan langsung ke dinas sosial ataupun melalui mitra dinas sosial yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) maupun Pendamping Keluarga Harapan (PKH). Usulan yang masuk tersebut diverifikasi kembali oleh petugas terutama pengelompokan desil (1 sampai dengan 5) dan kelengkapan berkas seperti foto yang bersangkutan, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK). Data yang diusulkan oleh masyarakat akan diverifikasi oleh Kemensos dan akan diklarifikasi ulang ke Dinas Sosial kembali untuk memastikan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan



Data capaian penyandang disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti sebesar 416 orang, penerima bantuan tersebut merupakan penerima dengan penyandang disabilitas dengan kedisabilitasannya yang berbeda. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala yang sering terjadi dilapangan terkait dengan proses pengajuan bantuan tersebut, antara lain:

1. Belum padan antara KTP dengan KK
2. Masyarakat yang mengajukan bantuan terkendala oleh desil yang memungkinkan tidak menerima bantuan (desil 6 sampai dengan 10), jika melakukan sanggah desil memerlukan waktu paling cepat 3 bulan
3. Kesulitan dalam mengakses ke alamat penerima saat distribusi barang bantuan

## **2. Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**

Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti di Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 sebanyak 28 (100%). Dinas Sosial melakukan pendataan dan verifikasi anak terlantar melalui Pemerintah Pekon/Kelurahan, Kecamatan melalui TKSK, Pekerja Sosial (Peksos) dan Pendamping Program Sosial (PKH) data yang dibutuhkan melalui identifikasi kondisi anak meliputi Kondisi keluarga, Pendidikan, kesehatan dan kondisi sosial ekonomi.

Selanjutnya dilakukan asesmen Sosial yang kerjakan oleh pekerja sosial untuk mengetahui penyebab keterlantaran, kebutuhan dasar anak serta potensi keluarga atau pengasuh. Hasil dari asesmen menjadi dasar pemberian bantuan atau intervensi, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar diluar panti dari Kementerian Sosial Republik



Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat antara lain, bantuan permakanan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak, perlengkapan sekolah (tas, buku, seragam, dan alat tulis), perlengkapan sandang atau pakaian layak pakai bagi anak, akses pelayanan kesehatan melalui fasilitas kesehatan atau program jaminan kesehatan serta bantuan sosial/stimulan untuk membantu keluarga atau pengasuh dalam merawat anak.

Pendampingan Sosial terhadap anak dan keluarganya dilakukan oleh pekerja sosial atau pendamping sosial secara terus menerus dengan tujuan memastikan kebutuhan anak terpenuhi, meningkatkan fungsi pengasuhan keluarga serta mencegah anak kembali terlantar. Selain itu dinas sosial melakukan koordinasi Lintas Sektor bekerja sama dengan dinas pendidikan (akses sekolah), dinas kesehatan (pelayanan kesehatan), pemerintah pekon/kelurahan, lembaga kesejahteraan sosial anak (LKSA).

Monitoring dan evaluasi oleh dinas sosial dilakukan secara berkala untuk melihat perkembangan anak, jika kondisi keluarga tidak mampu lagi merawat anak, dapat dipertimbangkan rujukan ke lembaga sosial atau panti.

### **3. Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**

Lanjut usia terlantar ( $\geq 60$  tahun) di luar panti di Kabupaten Lampung Barat mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat berupa bantuan dalam pemenuhan kebutuhan dasar berupa bantuan sembako atau makanan siap saji, paket gizi, alat bantu, bantuan sandang (pakaian, sepatu, perlengkapan tidur), fasilitasi akses pengobatan melalui jaminan kesehatan home care (kunjungan ke rumah) yang mem, layanan berikan perawatan dasar, pemantauan



kesehatan, atau perawatan lanjutan bagi lansia yang lemah fisiknya

Jumlah bantuan yang diberikan sebanyak 241 orang, barang yang diberikan merupakan bahan pengajuan yang diinput oleh operator melalui mitra dinas sosial (PKH dan TKSK) bekerjasama dengan desa, puskesmas, organisasi masyarakat, dan lembaga kesejahteraan sosial melakukan Identifikasi lanjut usia terlantar melalui pendataan terpadu dan dilanjutkan dengan pemantauan berkala untuk memastikan kebutuhan dasar terpenuhi.

Selain itu dilakukan pendampingan kepada lanjut usia dukung secara psikologis untuk terus beraktivitas sehari-hari agar lanjut usia tetap produktif dan terlibat dalam komunitas. Selain itu mendorong keterlibatan keluarga dan masyarakat agar lanjut usia tidak terisolasi. monitoring berkala dilaksanakan untuk menilai keberlanjutan dengan berkoordinasi antar instansi (Dinas kesehatan dan pemerintah desa) dengan tujuan memastikan lanjut usia tinggal layak di komunitasnya tanpa bergantung sepenuhnya pada panti.

#### **4. Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**

Jumlah gelandangan pengemis di Kabupaten Lampung Barat hanya 1 (satu) orang dan jenis bantuan yang diberikan berupa paket permakanan. Data tersebut didapatkan dari pendataan dinas sosial dalam mengidentifikasi gelandangan dan pengemis secara sistematis sehingga mereka tercatat dalam *Data Terpadu* sebagai penyandang masalah kesejahteraan sosial, sebagai dasar dalam merencanakan intervensi sesuai dengan kebutuhan individu atau keluarga.



Setelah terdata sebagai masyarakat Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) selanjutnya dinas sosial akan memberikan asesmen kebutuhan dasar seperti kesehatan dan psikososial. Peran pekerja sosial biasanya memberikan dukungan berupa pendampingan sosial agar kemampuan mereka untuk bekerja meningkat, langkah ini dimaksudkan agar mereka tidak kembali menjadi gelandangan atau pengemis meskipun telah mendapatkan bantuan.

Selanjutnya tidak hanya fokus pada kasus individual, ada upaya untuk melibatkan keluarga untuk reunifikasi sosial jika memungkinkan koordinasi lintas instansi (Dinas Sosial, Satpol PP, lembaga kemasyarakatan). Edukasi kepada masyarakat agar tidak memberi uang secara langsung di jalanan yang tak jarang justru memperkuat ketergantungan.

#### **5. Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 55 Tahun 2020 tentang Grand Design Kabupaten Tangguh Bencana, dibutuhkan program kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu mulai dari tahap pra bencana, saat bencana, hingga pasca bencana. Korban bencana yang jumlahnya tidak dapat dipastikan (bergantung kejadian bencana), pemerintah selalu hadir dengan menyediakan tempat bagi pengungsi, membangun dapur umum, memberi bantuan sembako, menyalurkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung berupa sandang, perlengkapan penanganan kelompok rentan, kasur, karpet, dan selimut.

penyediaan makanan (*Buffer Stock*). Persediaan untuk tahun 2025 sebanyak 200 paket yang yang diterima oleh 344 korban bencana, dengan jenis bencana kebakaran 134 paket, konflik



dengan satwa liar 29 paket, korban angin kencang/puting beliung 16 paket dan musibah banjir 21 paket dengan jenis bantuan berupa paket sembako.

Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan diawali dari laporan kejadian bencana dari pekon, kemudian dilakukan assesmen oleh tim dinsos/tagana untuk penetapan jumlah korban terdampak. Selanjutnya pengambilan logistik dari gudang sosial untuk langsung didistribusikan ke lokasi bencana

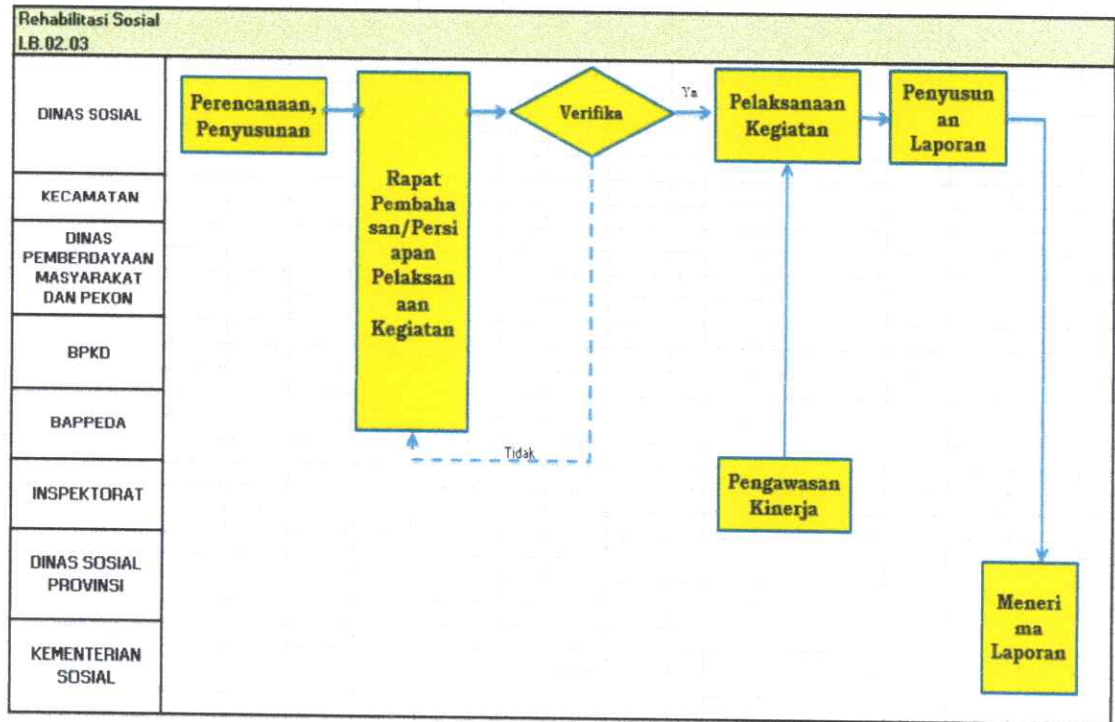
Untuk melihat gambaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam menjalankan operasionalnya, diperlukan peta proses bisnis yang tersusun secara terstruktur. Penyusunan dilaksanakan dengan tujuan agar Dinas Sosial mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien, mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal, memiliki aset pengetahuan yang menjadi dasar pengambilan keputusan strategis, mudah melihat potensi masalah dan potensi perbaikan, dan memiliki standar pelaksanaan pekerjaan.

Berikut ini gambaran peta proses bisnis pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terkait dengan Program Rehabilitasi Sosial sebagai berikut:



Grafik 1

Grafik *Flowchart* Rehabilitasi Sosial tahun 2025





Grafik 1

Peta Relasi Proses Bisni Dinas Sosial tahun 2025

MISI : 1 Meningkatnya PMKS Mandiri

DINSOS- 01							
<b>DINSOS – 01.01</b> Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>DINSOS – 01.02</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>DINSOS– 01.03</b> Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	<b>DINSOS – 01.04</b> Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	<b>DINSOS– 01.05</b> Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	<b>DINSOS– 01.06</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	<b>DINSOS – 01.07</b> Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>DINSOS – 01.08</b> Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN
1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat
<b>DINSOS – 01.09</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	<b>DINSOS – 01.10</b> Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	<b>DINSOS – 01.11</b> Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	<b>DINSOS – 01.12</b> Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	<b>DINSOS – 01.13</b> Monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	<b>DINSOS – 01.14</b> Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	<b>DINSOS – 01.15</b> Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<b>DINSOS – 01.16</b> Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Inspektorat	1 BKN 2 BKPDSDM 3 4	1 Pusdiklat LAN, 2 Pusdiklat Bappenas	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Toko penyedia	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Toko penyedia
<b>DINSOS – 01.17</b> Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<b>DINSOS – 01.18</b> Fasilitasi Kunjungan Tamu	<b>DINSOS– 01.19</b> Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<b>DINSOS – 01.20</b> Pengadaan Meubel	<b>DINSOS – 01.21</b> Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>DINSOS – 01.22</b> Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<b>DINSOS – 01.23</b> Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Lisbik	<b>DINSOS – 01.24</b> Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Media	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Toko penyedia	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Penyelenggaraan Acara	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Toko Penyedia	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Toko Penyedia	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Kantor Pos	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 PLN 4 PDAM, Telkom	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Bagian Pembangunan 4 Toko Penyedia





Dinas Sosial

<b>DINSOS – 01.25</b> Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<b>DINSOS – 01.26</b> Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<b>DINSOS – 01.27</b> Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>DINSOS – 01.28</b> Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<b>DINSOS – 01.29</b> Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	<b>DINSOS – 01.30</b> Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	<b>DINSOS – 01.31</b> Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	<b>DINSOS – 01.31</b> Penyediaan Permakanan
1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Samsat 4 SPBU	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Toko Penyedia	1 BPKD 2 BAPPEDA 3 Toko Penyedia	1 Kemensos 2 Yayasan Penyedia 3 Masyarakat	1 Kemensos 2 Pekon/Kelurahan 3 Masyarakat	1 Kemensos 2 BPJS Kesehatan 3 Pekon/Kelurahan 4 Masyarakat	1 Kemensos 2 Pekon/Kelurahan 3 Masyarakat 4 Kantor Pos/Bank Himbara	1 Pekon/Kelurahan 2 Masyarakat 3 Toko Penyedia
<b>DINSOS – 01.32</b> Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<b>DINSOS – 01.33</b> Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	<b>DINSOS – 01.34</b> Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	<b>DINSOS – 01.35</b> Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<b>DINSOS – 01.36</b> Penyediaan Makanan	<b>DINSOS – 01.37</b> Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	<b>DINSOS – 01.38</b> Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	
1 Pekon/Kelurahan 2 Tagana 3 Korban Bencana	1 Kemensos 2 Pekon/Kelurahan 3 Masyarakat 4 Kantor Pos/Bank Himbara 5 Lembaga Sosial	1 Kemensos 2 Pekon/Kelurahan 3 Masyarakat 4 Kantor Pos/Bank Himbara	1 Pekon/Kelurahan 2 Masyarakat	1 Pekon/Kelurahan 2 Tagana 3 Korban Bencana 4 Toko Penyedia	1 Pekon/Kelurahan 2 Tagana 3 Korban Bencana 4 Toko Penyedia	1 Taman Makam Pahlawan 2 Toko Penyedia	



### B. Perbandingan Kinerja

Secara umum Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2023-2026. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja yang ditetapkan, untuk pencapaian kinerja sasaran Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2

Capaian Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Jenis PMKS dan Formulasi Pengukuran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
Tahun 2025						
1	Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana)	%	91,73	92,51	100,85
Tahun 2024						
2		5	%	87,82	91,22	103,87

Tahun 2023 Dinas Sosial sudah beralih ke Renstra Dinas Sosial 2023-2026 yang berpedoman pada Rencana Pembangunan



Daerah (RPD) Lampung Barat 2023-2026. sasaran strategisnya adalah Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang Berdaya dengan indikator Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya dengan 5 (lima) jenis PMKS menggunakan formulasi pengukuran yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### 1. Perbandingan Kinerja dengan Target Nasional (Target SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang penerapan SPM. SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan oleh Pemda untuk rakyatnya, maka target SPM harus 100% setiap tahunnya sesuai dengan target nasional, terkait dengan target tersebut Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat juga mengemban amanah dalam pencapaian SPM tersebut sesuai target yang diterapkan. Realisasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2024 terhadap target SPM urusan sosial sebagai berikut:

Tabel 4.5  
Perbandingan Target Nasional dengan Realisasi Kinerja SPM Bidang Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Kabupaten	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	100%	43/43 X 100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi	100 %	100%	28/28 X 100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi Kabupaten	Keterangan
	anak telantar di luar panti	Kebutuhan dasarnya diluar panti			
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	100%	241/241 X 100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan dasarnya diluar panti	100 %	100%	1/1 X 100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran / Jumlah Korban Bencana alam dan sosial di daerah kab/kota	100 %	100%	344/344 X 100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa semua target indikator kinerja SPM tercapai 100%. Jika dibandingkan dengan target Nasional, realisasi Lampung Barat sama-sama tercapai 100%. Hal ini berarti penanganan 5 unsur pembentuk indikator sasaran PMKS telah tertangani sesuai target kinerja, baik pada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat atau secara nasional. Meski disadari, dibalik angka-angka yang menjadi target ini, masih ada banyak angka penyandang masalah kesejahteraan sosial yang perlu diperhatikan melalui penanganan dan pencegahan. Pelayanan SPM bidang sosial merupakan pelayanan yang bersifat lintas sektoral sehingga tidak bisa dilakukan oleh Dinas Sosial saja, tetapi perlu dukungan dan kerja sama dengan OPD, Stake holder terkait, keluarga dan masyarakat bahkan tidak menutup kemungkinan



bersinergi dengan kabupaten/kota lain, provinsi maupun kementerian sosial.

## 2. Perbandingan Kinerja dengan Target dan atau capaian kinerja tingkat Provinsi Lampung

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang sama-sama memiliki tugas dan fungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk urusan sosial, namun terdapat perbedaan yang jelas untuk capaian kinerja masing-masing. Lingkup Dinas Sosial Kabupaten kota/kabupaten sebatas diluar panti, sedangkan Dinas Sosial Provinsi cakupannya penanganan didalam panti. Untuk melihat capaiannya dapat dijelaskan pada tabel berikut.:

Tabel 4.6  
Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Lampung Barat dengan  
Provinsi Lampung tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kabupaten Lampung Barat		Provinsi Lampung	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti (dalam panti)*	100%	100%	100%	100%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti (dalam Panti)*	100%	100%	100%	100%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti (dalam panti)*	100%	100%	100%	100%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti (dalam panti)*	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota (dalam panti)*	100%	100%	100%	100%
	Total	100%	100%	100%	100%

Ket: \* (dalam panti) kewenangan Provinsi

Kinerja Dinas Sosial Provinsi Lampung mengacu pada SPM Provinsi namun lingkupnya dalam panti, upaya yang dilakukan



oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Sosial Provinsi menunjukkan hasil yang baik dari target yang sudah ditentukan. Secara keseluruhan, total capaian kinerja Lampung Barat memang lebih unggul dari capaian Provinsi Lampung. Meski begitu, hal tersebut didasari pada cakupan area pertanggungjawaban yang berbeda. Pemerintah Provinsi Lampung jelas mencakupi area 15 kabupaten/ kota. Maka perolehan capaian kinerja merupakan akumulasi dari 15 kab/ kota tersebut.

### 3. Benchmarking

Perbandingan capaian kinerja dengan perangkat daerah sejenis di Wilayah Provinsi Lampung dalam upaya pengukuran kinerja dengan kabupaten lain, untuk hal ini sebagai evaluasi kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat menyandingkan dengan Kabupaten Pesisir Barat, data capaian kinerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.7  
Pencapaian Kinerja SPM Kabupaten Lampung Barat dengan  
Kabupaten Pesisir Barat tahun 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi Kabupaten	
			Lampung Barat	Pesisir Barat
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	100%	100%	89,23%
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	100%	100%	90%
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	100%	100%	90,77%
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	93,33%
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	100%	100%	100%
	Total		100%	92,66%

\*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan 2024



Pencapaian kinerja masing-masing kabupaten di seluruh Indonesia sudah ditentukan targetnya oleh Kementerian Sosial sebesar 100%, hal tersebut berdasarkan Permensos Nomor 9 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk realisasinya menyesuaikan dengan jumlah PMKS dari masing-masing kabupaten yang akan ditangani. Selain itu anggaran biaya yang tersedia dalam penanganan PMKS sangat berpengaruh pada capaian kinerja kabupaten masing-masing.

Pada Kabupaten Lampung Barat, area pertanggungjawaban pengelolaan penyandang masalah kesejahteraan hanya mencakupi wilayah teritorial Kabupaten Lampung Barat saja. Secara geografis, wilayah Kabupaten Lampung Barat berbeda dengan Kabupaten Lampung Way Kanan. Meski sebagian wilayahnya sama, yaitu perbukitan, namun dominasinya berbeda. Way Kanan di dominasi oleh dataran, sementara Lampung Barat didominasi oleh Perbukitan. Belum lagi disertai oleh berbagai faktor seperti kondisi alam, lingkungan dan cuaca yang berbeda di Lampung Barat jika dibandingkan dengan kab/ kota lainnya di Provinsi Lampung. Namun hal tersebut dapat ditangani sehingga capaian kinerja Lampung Barat dapat mencapai 100%.

**C. Realisasi Anggaran Tahun 2025**Tabel 4.8  
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2025

KODE REKENING	URAIAN	Anggaran Perubahan akhir	REALISASI	SISA ANGGARAN	%
<b>1.06.01</b>	<b>DINAS SOSIAL</b>				
<b>1.06.01.5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>4.888.099.687</b>	<b>4.722.336.851</b>	<b>165.762.836</b>	<b>96,61</b>
<b>1.06.01.5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>4.821.951.687</b>	<b>4.656.202.851</b>	<b>165.748.836</b>	<b>96,56</b>
1.06.01.5.1.01	Belanja Pegawai	2.744.465.641	2.600.618.364	143.847.277	94,76
1.06.01.5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.962.486.046	1.940.584.487	21.901.559	98,88
1.06.01.5.1.05	Belanja Hibah	115.000.000	115.000.000	0	100,00
1.06.01.5.1.06	Belanja Bantuan Sosial				
<b>1.06.01.5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>66.148.000</b>	<b>66.134.000</b>	<b>14.000</b>	<b>99,98</b>
1.06.01.5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	66.148.000	66.134.000	14.000	99,98
<b>1.06.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>	<b>3.275.461.641</b>	<b>3.122.347.545</b>	<b>153.114.096</b>	<b>97,37</b>
<b>1.06.01.2.01</b>	<b>Perencanaan Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>53.639.000</b>	<b>53.471.000</b>	<b>168.000</b>	<b>99,69</b>
1.06.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21.839.000	21.671.000	168.000	99,23
1.06.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.385.000	4.385.000	0	100,00
1.06.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.775.000	7.775.000	0	100,00
1.06.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	5.430.000	5.430.000	0	100,00
1.06.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	5.445.000	5.445.000	0	100,00
1.06.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.465.000	3.465.000	0	100,00
1.06.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.300.000	5.300.000	0	100,00
<b>1.06.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.752.435.641</b>	<b>2.608.588.364</b>	<b>143.847.277</b>	<b>94,49</b>





1.06.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.744.465.641	2.600.618.364	143.847.277	94,47
1.06.01.2.02.05	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.000.000	3.000.000	0	100,00
1.06.01.2.02.07	Koordinasi & Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	2.465.000	2.465.000	0	100,00
1.06.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.505.000	2.505.000	0	100,00
<b>1.06.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>8.545.000</b>	<b>8.545.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
1.06.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8.545.000	8.545.000	0	100,00
<b>1.06.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>13.366.000</b>	<b>13.366.000</b>	<b>0</b>	<b>99,44</b>
1.06.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3.366.000	3.366.000	0	97,82
1.06.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.000.000	10.000.000	0	100,00
<b>1.06.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>201.098.000</b>	<b>201.055.626</b>	<b>42.374</b>	<b>99,98</b>
1.06.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor	7.938.000	7.938.000	0	100,00
1.06.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.231.000	30.231.000	0	100,00
1.06.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.060.000	12.060.000	0	100,00
1.06.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.950.000	6.950.000	0	100,00
1.06.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.919.000	143.876.626	42.374	99,97
<b>1.06.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>32.800.000</b>	<b>32.800.000</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
1.06.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	6.800.000	6.800.000	0	100,00
1.06.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.000.000	26.000.000	0	100,00



<b>1.06.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>83.218.000</b>	<b>79.879.383</b>	<b>3.338.617</b>	<b>84,11</b>
1.06.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	0	100,00
1.06.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.555.000	34.306.383	2.248.617	93,85
1.06.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	41.663.000	40.573.000	1.090.000	97,38
<b>1.06.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>130.360.000</b>	<b>124.642.172</b>	<b>5.717.828</b>	<b>95,61</b>
1.06.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	116.750.000	111.032.172	5.717.828	95,10
1.06.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.160.000	10.160.000	0	100,00
1.06.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	3.450.000	3.450.000	0	100,00
<b>1.06.04</b>	<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>1.262.175.000</b>	<b>1.253.351.056</b>	<b>8.823.944</b>	<b>99,30</b>
<b>1.06.04.2.01</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar ,Anak Terlantar, lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial</b>	<b>251.800.000</b>	<b>251.257.456</b>	<b>542.544</b>	<b>99,78</b>
1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik Mental, Spiritual dan Sosial (Perawatan ODGJ 8 Orang)	179.462.000	179.369.000	93.000	99,95
1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat (Assesment Kemenkes)	60.838.000	60.453.456	384.544	99,37
1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar (Verval PBI)	11.500.000	11.435.000	65.000	99,43



<b>1.06.04.2.02</b>	<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>1.010.375.000</b>	<b>1.002.093.600</b>	<b>8.281.400</b>	<b>106,02</b>
1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan data dan Pengaduan	13.343.000	13.317.400	25.600	99,81
1.06.04.2.02.03	Penyediaan Perumahan ( <b>1000 paket berupa Sembako Lansia 750 paket + sembako kelompok rentan 25 paket</b> )	243.443.000	243.030.500	412.500	99,83
1.06.04.2.02.07	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial ( <b>Honor Tagana 90 orang</b> )	65.446.000	63.379.350	2.066.650	96,84
1.06.04.2.02.08	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan korban HIV/AIDS dan Napza ( <b>KUBE 3 paket (2 prasmanan, 1 kube ayam), Honor Pendamping BPNT (25,000) dan Hibah (LVRI, PEPABRI, LKS, karang taruna)</b> )	325.063.000	324.725.000	338.000	99,90
1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses Ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar ( <b>Honor pendamping PKH 15,000</b> )	363.080.000	357.641.350	5.438.650	98,50
<b>1.06.05</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>55.288.000</b>	<b>55.282.400</b>	<b>5.600</b>	<b>99,99</b>
<b>1.06.05.2.02</b>	<b>Pengelolaan data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>55.288.000</b>	<b>55.282.400</b>	<b>5.600</b>	<b>99,99</b>
1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ( <b>Pendataan PPKS dan PSKS 15.000</b> )	55.288.000	55.282.400	5.600	99,99
<b>1.06.06</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>164.325.000</b>	<b>160.525.850</b>	<b>3.799.150</b>	<b>106,57</b>
<b>1.06.06.2.01</b>	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>164.325.000</b>	<b>160.525.850</b>	<b>3.799.150</b>	<b>106,57</b>
1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan ( <b>buffer stock bencana 200 orang</b> )	123.385.000	120.355.850	3.029.150	109,72
1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi ( <b>2 unit</b> )	40.940.000	40.170.000	770.000	98,12
<b>1.06.07</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>130.850.046</b>	<b>130.830.000</b>	<b>20.046</b>	<b>99,98</b>



Dinas Sosial

---

<b>1.06.07.2.01</b>	<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</b>	<b>130.850.046</b>	<b>130.830.000</b>	<b>20.046</b>	<b>99,98</b>
1.06.07.2.01.01	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	130.850.046	130.830.000	20.046	99,98
	<b>TOTAL</b>	<b>4.888.099.687</b>	<b>4.722.336.851</b>	<b>165.762.836</b>	<b>96,61</b>

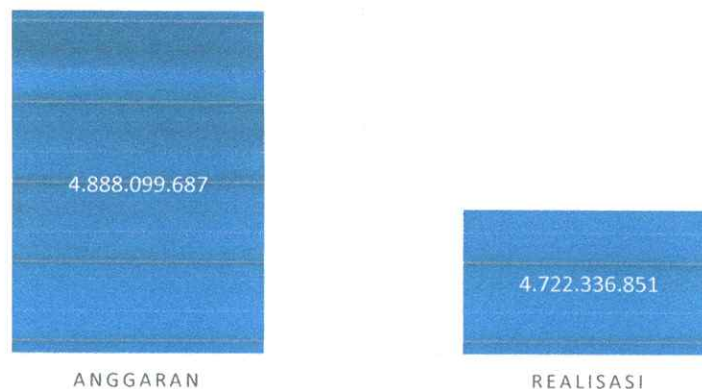


Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat pada Tahun 2025 melaksanakan berbagai program dan kegiatan dan sub kegiatan dengan jumlah Program termasuk program rutin sebanyak 5 (lima) Program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan. Alokasi dana Tahun 2025 sebesar Rp. 4.888.099.687,- (empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) terealisasi sebesar Rp 4.722.336.851 (empat milyar tujuh ratus dua puluh dua juta tiga ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah) atau 96,61 persen dengan kriteria penilaian realisasi anggaran **“SANGAT TINGGI”** Dari seluruh sub kegiatan realisasi fisik atau kinerja keluarannya tercapai 100 persen. Berdasarkan indikator sebagaimana yang termuat dalam Renstra Dinas Sosial tahun 2023-2026 tercapai 100%. Realisasi dari anggaran tahun 2025 dapat dilihat dari grafik sebagai berikut

Grafik 2

Realiasi anggaran tahun 2025

### REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025





Untuk efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025 disajikan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.9  
Efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2025

No	Sasaran strategis	Indicator kinerja	% capaian kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat efisiensi
1	Meningkatnya PMKS Yang Berdaya	% Peningkatan PMKS yang Berdaya	26 orang	97,40	2,6%
2	Meningkatnya PMKS Yang Berdaya	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25.000 orang	98,20	1,8
3	Meningkatnya PMKS Yang Berdaya	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000 orang	98,33	1,67

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan. Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien.



---

#### **D. Pemanfaatan Laporan Kinerja**

Pemanfaatan Laporan Kinerja Laporan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini didapat dimanfaatkan sebagai:

1. Bahan evaluasi kinerja Perangkat daerah dan individu dalam pelaksanaan pekerjaan.
2. Bahan Laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan Perangkat Daerah
3. Bahan Laporan kinerja dibuat untuk mempermudah manajemen dalam melakukan pengendalian intern, serta untuk menunjukkan bahwa anggaran dibelanjakan secara efisien dan bermanfaat pada kegiatan operasional perusahaan.
4. Laporan digunakan sebagai sumber informasi dan memandu perbaikan dalam menyusun rencana kegiatan selanjutnya. Membantu penetapan kebijakan secara cepat, meningkatkan perkembangan kegiatan di masa yang akan datang.
5. Laporan kinerja merupakan bukti dan wujud pertanggungjawaban atas hasil kinerja yang sudah dilakukan selama waktu yang sudah ditentukan.

#### **E. Survei Kepuasan Masyarakat pengguna Pelayanan Publik**

Pengukuran SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 dilaksanakan selama 1 (satu) tahun dari bulan Januari s/d Desember 2025. Dari hasil pengukuran SKM Periode tersebut dengan jumlah responden sebanyak 556 orang didapat point **86,4 (Mutu: Baik)**

Survey yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang



Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Jika diakumulasikan untuk tahun 2023 Jumlah kunjungan masyarakat sebanyak 556 orang dengan tabel rincian sebagai berikut:

Tabel 4.10  
Rekap Kunjungan Masyarakat

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMLAH	PERSENTASE
1	Jenis Kelamin	Laki-laki	263	47,30%
		Perempuan	293	52,70%
			556	100,00%
2	Pendidikan	SD	128	23,02%
		SMP/Sederajat	326	58,63%
		SMA/Sederajat	102	18,35%
		S1/DIV	0	3,53%
			556	100,00%
3	Pekerjaan	Buruh	4	1%
		Irt (Ibu Rumah Tangga)	116	20,86%
		Wirausaha	1	0,18%
		Petani/Pekebun	308	55%
		Pelajar	127	22,84%
			556	100,00%
4	Jenis Layanan	BPJS PBI/KISS	325	58,45%
		BPNT	12	2,16%
		PKH	107	19,24%
		BANTUAN YAPI	40	7,19%
		KIP	72	12,95%
			556	100,00%

Dengan demikian, secara keseluruhan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Dinas Sosial Kabupaten Lampung pada tahun 2025 Barat sudah dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran dengan mutu **B atau Baik**.





## **BAB V PENUTUP**

### **A. Simpulan Umum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang disusun ini merupakan pertanggungjawaban Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat atas penyelenggaraan Rencana Kerja selama tahun 2025 secara umum keseluruhan program kerja dan kegiatan dapat terlaksana dengan lancar sesuai dengan rencana kerja dan jadwal yang telah disusun. Terdapat 5 (lima) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 39 (tiga puluh sembilan) sub kegiatan anggaran yang terserap sebesar 96,61% dengan kriteria penilaian realisasi anggaran "SANGAT TINGGI".

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial tahun 2025 yaitu Presentase Peningkatan PMKS yang Berdaya telah tercapai 92.51% dari target yang ditetapkan sebesar 91,73% atau 100.85% capaian dari targetnya. Faktor yang menjadi keberhasilan pencapaian target IKU Dinas Sosial adalah adanya Pemberian Bantuan terhadap Penyandang Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar yang berasal dari Kementerian Sosial Republik Indonesia.

### **B. Faktor Pendukung Keberhasilan**

Target Sasaran Strategis dengan indikator kegiatan yang sudah ditentukan telah terlaksana dan dapat memenuhi target yang ada, tentunya diperlukan dukungan pemerintah daerah berupa anggaran yang memadai, perangkat daerah yang mendukung serta peran mitra Dinas Sosial yaitu Pekerja Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang tersebar di seluruh Wilayah Kabupaten Lampung Barat yang berjumlah 1.049 orang yang terdiri dari 11 jenis profesi. Peran dari PSKS yaitu memberikan



pelayanan sosial baik kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan nilai-nilai pekerjaan sosial.

### **C. Permasalahan**

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

1. Anggaran yang belum memadai untuk penanganan Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan lebih mengutamakan pada sasaran kinerja yang tertuang dalam capaian standar pelayanan minimal (SPM) bidang sosial untuk pelayanan dasar kepada masyarakat
2. Adanya perubahan peraturan dari pusat yang harus diterapkan dan memerlukan waktu untuk penyesuaian terkait dengan target, sasaran, indikator dan capaian yang tidak sesuai dengan renstra yang sudah dibuat
3. Sarana dan prasarana yang perlu diperbarui/ditambah karena ada beberapa fasilitas yang tidak layak digunakan.

### **D. Rekomendasi dan Tindak Lanjut**

Langkah-langkah Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam menghadapi permasalahan dan kendala yang dialami selama proses pelaksanaan kegiatan tahun 2025 adalah:

1. Komitmen pimpinan dan dukungan aparatur Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat dalam Penanganan PPKS di Kabupaten Lampung Barat
2. Peningkatan jejaring sinergi antar perangkat daerah kabupaten kota lain, Dinas Sosial Provinsi, Kementerian



Sosial maupun mitra kerja lainnya yang mendukung dalam penanganan PPKS

3. Pembinaan dan pengawasan para Pekerja Sosial Kabupaten Lampung Barat guna peningkatan penanganan Penyandang PPKS
4. Sumber daya yang proporsional dalam mendukung pencapaian sasaran dan indikator.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

**ALİYURDIN, S.Sos., M.H**  
Pembina TK I/IV.b

NIP. 197211201994021002

## DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2025 DINAS SOSIAL

### A. Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti

Penyerahan Bantuan di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit



Penyerahan Bantuan di Pekon Sukau Kecamatan Sukau



Penyerahan Bantuan di Pekon Sukau Kecamatan Sukau



Penyerahan Bantuan di Pekon Wates Kecamatan Balik Bukit



**B. Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti**

Penyerahan Bantuan di Kelurahan Way Mengaku, Kecamatan Balik Bukit



Penyerahan Bantuan di Pekon Batu Brak Kecamatan Batu Brak



Penyerahan Bantuan di Pekon Balak Kecamatan Balik Buki



C. Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti

Penyerahan Bantuan di Kecamatan Kebun Tebu



Penyerahan Bantuan di Pekon Kubu Liku Jaya Kecamatan Batu Ketulis



Penyerahan Bantuan di Pekon Puralaksana Kecamatan Way Tenong



Penyerahan Bantuan Lansia Kecamatan Sumber Jaya



D. Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhannya diluar panti

Penyerahan Bantuan Gelandangan Pengemis Kecamatan Sekincau



Penyerahan Bantuan Gelandangan Pengemis Kecamatan Air Hitam



Penyerahan Bantuan Gelandangan Pengemis Kecamatan Balik Bukit



E. Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

Penyerahan Bantuan Bencana Pekon Cipta Waras Kecamatan Kebun Tebu



Penyerahan Bantuan Bencana Pekon Pagar Dewa Kecamatan Pagar Dewa



Penyerahan Bantuan Bencana Pekon Muara Jaya Kecamatan Kebun Tebu



Penyerahan Bantuan Bencana Pekon Purawiwitan Kecamatan Kebun Tebu





**Evaluasi Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial**  
**Priode 2023-2026**  
**Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS											PENANGGUNG JAWAB
	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET SAMPAI DENGAN				REALISASI SAMPAI DENGAN				
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	
1	9	10	11	12	13	14	15	12	13	14	15	16
1	Meningkatnya PMKS yang berdaya	Presentase Peningkatan PMKS yang berdaya	Persen	10,00%	25,00%	50,00%	91.73%	11,22%	53,86%	53,86%	92,51%	KEPALA DINAS SOSIAL

Liwa, 26 Januari 2026

KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**ALIYURDIN, S.Sos.,M.H**

NIP. 19721120 199402 1 002

**RENCANA AKSI TINGKAT PROGRAM DINAS SOSIAL  
PRIODE 2023-2026  
TAHUN 2025**

**LAMPIRAN II  
DINAS SOSIAL KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM									PENANGGUNG JAWAB	
		PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	Kinerja Per Triwulan			Keuangan Per Triwulan Akumulatif				
					Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		
1	2	3	4	5	6	6	6	7	7	7	8	
1	Meningkatnya PMKS yang berdaya	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Trw 1= 78,95%	Trw 1= 80,35%	101,77%	Trw 1= 961.233.712	Trw 1= 828.462.740	86,19%	Sekretaris Dinas	
					Trw 2= 78,95%	Trw 2= 80,35%	101,77%	Trw 2= 1.918.326.921	Trw 2= 1.657.411.324	86,40%		
					Trw 3= 78,95%	Trw 3= 80,35%	101,77%	Trw 3= 2.608.560.527	Trw 3= 2.345.386.722	89,91%		
					Trw 4= 78,95%	Trw 4= 80,35%	101,77%	Trw 4= 3.275.461.641	Trw 4= 3.122.347.545	95,33%		
2	Meningkatnya PMKS yang berdaya	Program Rehabilitasi Sosial	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	Trw 1= 58,65%	Trw 1= 57,29%	97,69%	Trw 1= 89.494.000	Trw 1= 39.617.400	44,27%	Kabid Rehabilitasi Sosial	
					Trw 2= 58,65%	Trw 2= 58,05%	98,97%	Trw 2= 222.641.000	Trw 2= 177.000.400	79,50%		
					Trw 3= 58,65%	Trw 3= 58,05%	98,97%	Trw 3= 222.641.000	Trw 3= 215.400.400	96,75%		
					Trw 4= 58,65%	Trw 4= 62,56%	106,66%	Trw 4= 240.300.000	Trw 4= 239.822.456	99,80%		
			Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Trw 1= 13,23%	Trw 1= 18,83%	142,35%	Trw 1= 135.284.000	Trw 1= 90.948.000	67,23%	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
					Trw 2= 13,23%	Trw 2= 18,84%	142,39%	Trw 2= 518.549.000	Trw 2= 253.082.350	48,81%		
					Trw 3= 13,23%	Trw 3= 18,89%	142,79%	Trw 3= 651.219.000	Trw 3= 574.180.700	88,17%		
					Trw 4= 13,23%	Trw 4= 19,63%	148,38%	Trw 4= 1.008.532.000	Trw 4= 1.000.211.200	99,17%		
				Meningkatnya kualitas layanan rujukan terpadu	IKM	Trw 1= B	Trw 1= B	100,00%	Trw 1= 1.250.000	Trw 1= 1.250.000	100,00%	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
						Trw 2= B	Trw 2= B	100,00%	Trw 2= 13.343.000	Trw 2= 8.617.400	64,58%	
						Trw 3= B	Trw 3= B	100,00%	Trw 3= 13.343.000	Trw 3= 9.947.400	74,55%	
						Trw 4= B	Trw 4= B	100,00%	Trw 4= 13.343.000	Trw 4= 13.317.400	99,81%	
3	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Meningkatnya data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	Persentase data penerima program perlindungan dan jaminan sosial yang valid	Trw 1= 100,00%	Trw 1= 100,00%	100,00%	Trw 1= 800.000	Trw 1= -	0,00%	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Trw 2= 100,00%	Trw 2= 100,00%	100,00%	Trw 2= 52.288.000	Trw 2= 21.890.900	41,87%		
					Trw 3= 100,00%	Trw 3= 100,00%	100,00%	Trw 3= 55.288.000	Trw 3= 42.247.400	76,41%		
					Trw 4= 100,00%	Trw 4= 100,00%	100,00%	Trw 4= 55.288.000	Trw 4= 55.282.400	99,99%		
4	Meningkatnya PMKS yang berdaya	Program Penangan Bencana	Optimalnya pemberian bantuan bagi korban bencana	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	Trw 1= 100,00%	Trw 1= 100,00%	100,00%	Trw 1= 54.275.000	Trw 1= 15.030.350	27,69%	Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial	
					Trw 2= 100,00%	Trw 2= 100,00%	100,00%	Trw 2= 110.175.000	Trw 2= 36.054.350	32,72%		
					Trw 3= 100,00%	Trw 3= 100,00%	100,00%	Trw 3= 142.645.000	Trw 3= 97.056.350	68,04%		
					Trw 4= 100,00%	Trw 4= 100,00%	100,00%	Trw 4= 164.325.000	Trw 4= 160.525.850	97,69%		
5	Meningkatnya PMKS yang berdaya	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% komponen utama taman makam pahlawan	Trw 1= 78,57%	Trw 1= 78,57%	100,00%	Trw 1= 55.084.462	Trw 1= 59.037.000	107,18%	Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	
					Trw 2= 78,57%	Trw 2= 78,57%	100,00%	Trw 2= 109.240.046	Trw 2= 102.684.000	94,00%		
					Trw 3= 78,57%	Trw 3= 78,57%	100,00%	Trw 3= 127.850.046	Trw 3= 119.335.000	93,34%		
					Trw 4= 78,57%	Trw 4= 78,57%	100,00%	Trw 4= 130.850.046	Trw 4= 130.830.000	99,98%		

Liwa, 26 Januari 2026  
**KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
  
**ALIYURDIN, S.Sos., M.H.**  
 NIP. 19721120 199402 1 002

**Rencana Aksi Tingkat Kegiatan Dinas Sosial  
Periode 2023-2026  
Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
						Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi	
1	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 : 4 Dokumen	Trw 1 : 4 Dokumen	Trw 1 : 6.775.000	Trw 1 : 4.800.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 4 Dokumen	Trw 2 : 4 Dokumen	Trw 2 : 6.775.000	Trw 2 : 6.775.000	
						Trw 3 : 4 Dokumen	Trw 3 : 4 Dokumen	Trw 3 : 6.775.000	Trw 3 : 6.775.000	
						Trw 4 : 4 Dokumen	Trw 4 : 4 Dokumen	Trw 4 : 21.839.000	Trw 4 : 21.671.000	
				Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Penganggaran Daerah yang di susun	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
						Trw 3 : 4 Dokumen	Trw 3 : 4 Dokumen	Trw 3 : 13.220.000	Trw 3 : 13.220.000	
						Trw 4 : 6 Dokumen	Trw 4 : 6 Dokumen	Trw 4 : 23.035.000	Trw 4 : 23.035.000	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 : 11 Laporan	Trw 1 : 11 Laporan	Trw 1 : 5.300.000	Trw 1 : 3.000.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 12 Laporan	Trw 2 : 12 Laporan	Trw 2 : 5.300.000	Trw 2 : 5.300.000	
						Trw 3 : 13 Laporan	Trw 3 : 13 Laporan	Trw 3 : 5.300.000	Trw 3 : 5.300.000	
						Trw 4 : 14 Laporan	Trw 4 : 14 Laporan	Trw 4 : 8.765.000	Trw 4 : 8.765.000	
2	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Trw 1 : 25 Orang	Trw 1 : 25 Orang	Trw 1 : 773.713.612	Trw 1 : 686.286.596	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 28 Orang	Trw 2 : 28 Orang	Trw 2 : 1.599.900.421	Trw 2 : 1.409.295.154	
						Trw 3 : 28 Orang	Trw 3 : 28 Orang	Trw 3 : 2.217.540.527	Trw 3 : 1.982.594.227	
						Trw 4 : 28 Orang	Trw 4 : 28 Orang	Trw 4 : 2.744.463.641	Trw 4 : 2.600.618.364	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 : 0 Laporan	Trw 1 : 0 Laporan	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 0 Laporan	Trw 2 : 0 Laporan	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
						Trw 3 : 0 Laporan	Trw 3 : 0 Laporan	Trw 3 : -	Trw 3 : -	
						Trw 4 : 1 Laporan	Trw 4 : 1 Laporan	Trw 4 : 3.000.000	Trw 4 : 3.000.000	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 1 : 0 Laporan	Trw 1 : 0 Laporan	Trw 1 : 2.465.000	Trw 1 : 1.800.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 1 Laporan	Trw 2 : 1 Laporan	Trw 2 : 2.465.000	Trw 2 : 1.800.000	
						Trw 3 : 1 Laporan	Trw 3 : 1 Laporan	Trw 3 : 2.465.000	Trw 3 : 1.800.000	
						Trw 4 : 2 Laporan	Trw 4 : 2 Laporan	Trw 4 : 2.465.000	Trw 4 : 2.465.000	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 2.505.000	Trw 2 : -	
						Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 2.505.000	Trw 3 : 2.505.000	
						Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 2.505.000	Trw 4 : 2.505.000	

3	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 : 1 Dokumen	Trw 1 : 1 Dokumen	Trw 1 : 5.085.000	Trw 1 : 3.200.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 8.545.000	Trw 2 : 5.085.000	
						Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 8.545.000	Trw 3 : 5.085.000	
						Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 8.545.000	Trw 4 : 8.545.000	
4	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 : 1 Dokumen	Trw 1 : 1 Dokumen	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
						Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : -	Trw 3 : -	
						Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 3.366.000	Trw 4 : 3.366.000	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Trw 1 : 0 Orang	Trw 1 : 0 Orang	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 0 Orang	Trw 2 : 0 Orang	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
						Trw 3 : 0 Orang	Trw 3 : 0 Orang	Trw 3 : -	Trw 3 : -	
						Trw 4 : 2 Orang	Trw 4 : 2 Orang	Trw 4 : 10.000.000	Trw 4 : 10.000.000	
5	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Trw 1 : 1 Paket	Trw 1 : 1 Paket	Trw 1 : 7.938.000	Trw 1 : 7.938.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 1 Paket	Trw 2 : 1 Paket	Trw 2 : 7.938.000	Trw 2 : 7.938.000	
						Trw 3 : 1 Paket	Trw 3 : 1 Paket	Trw 3 : 7.938.000	Trw 3 : 7.938.000	
						Trw 4 : 1 Paket	Trw 4 : 1 Paket	Trw 4 : 7.938.000	Trw 4 : 7.938.000	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Trw 1 : 3 Paket	Trw 1 : 3 Paket	Trw 1 : 10.445.000	Trw 1 : 10.445.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 6 Paket	Trw 2 : 6 Paket	Trw 2 : 15.097.000	Trw 2 : 15.097.000	
						Trw 3 : 9 Paket	Trw 3 : 9 Paket	Trw 3 : 24.097.000	Trw 3 : 24.097.000	
						Trw 4 : 12 Paket	Trw 4 : 12 Paket	Trw 4 : 30.231.000	Trw 4 : 30.231.000	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Trw 1 : 8 Dokumen	Trw 1 : 8 Dokumen	Trw 1 : 3.015.000	Trw 1 : 3.015.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 8 Dokumen	Trw 2 : 8 Dokumen	Trw 2 : 6.030.000	Trw 2 : 6.030.000	
						Trw 3 : 8 Dokumen	Trw 3 : 8 Dokumen	Trw 3 : 9.045.000	Trw 3 : 9.045.000	
						Trw 4 : 8 Dokumen	Trw 4 : 8 Dokumen	Trw 4 : 12.060.000	Trw 4 : 12.060.000	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 1.135.000	Trw 1 : 1.135.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 2.927.000	Trw 2 : 2.927.000	
						Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 4.763.000	Trw 3 : 4.763.000	
						Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 6.950.000	Trw 4 : 6.950.000	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 48.945.000	Trw 1 : 26.316.953	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 75.104.000	Trw 2 : 61.255.531	
						Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 75.104.000	Trw 3 : 74.165.531	
						Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 143.919.000	Trw 4 : 143.876.626	
6			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya pengadaan barang milik daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Trw 1 : 6 Unit	Trw 1 : 6 Unit	Trw 1 : 32.800.000	Trw 1 : 32.800.000	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 6 Unit	Trw 2 : 6 Unit	Trw 2 : 32.800.000	Trw 2 : 32.800.000	
						Trw 3 : 6 Unit	Trw 3 : 6 Unit	Trw 3 : 32.800.000	Trw 3 : 32.800.000	
						Trw 4 : 6 Unit	Trw 4 : 6 Unit	Trw 4 : 32.800.000	Trw 4 : 32.800.000	
7	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 2.000.000	Trw 1 : 2.000.000	Sekretaris Dinas Sosial

		DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pemerintahan Daerah			Trw 2 : 6 laporan	Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 4.000.000	Trw 2 : 4.000.000	
						Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	4.000.000	4.000.000	
						Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	5.000.000	5.000.000	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	13.140.000	Trw 1 : 5.512.870	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 6 laporan	Trw 2 : 6 Laporan	26.280.000	Trw 2 : 15.431.510	
						Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	39.420.000	Trw 3 : 25.340.092	
						Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	36.555.000	Trw 4 : 34.306.383	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	6.852.100	Trw 1 : 6.582.100	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 6 laporan	Trw 2 : 6 Laporan	25.503.000	Trw 2 : 23.248.900	
						Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	31.353.000	Trw 3 : 28.828.900	
						Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	41.663.000	Trw 4 : 40.573.000	
8	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 : 5 Unit	Trw 1 : 5 Unit	41.625.000	Trw 1 : 33.631.221	Sekretaris Dinas Sosial
						Trw 2 : 14 Unit	Trw 2 : 14 Unit	97.157.500	Trw 2 : 60.428.229	
						Trw 3 : 41 Unit	Trw 3 : 41 Unit	123.690.000	Trw 3 : 117.129.972	
						Trw 4 : 51 Unit	Trw 4 : 51 Unit	130.360.000	Trw 4 : 124.642.172	
9	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 8 orang	Trw 1 : 8 orang	59.800.000	Trw 1 : 14.082.000	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
						Trw 2 : 8 orang	Trw 2 : 8 orang	179.462.000	Trw 2 : 139.235.000	
						Trw 3 : 8 orang	Trw 3 : 8 orang	179.462.000	Trw 3 : 177.635.000	
						Trw 4 : 8 orang	Trw 4 : 8 orang	179.462.000	Trw 4 : 179.369.000	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan	Trw 1 : 150 orang	Trw 1 : 197 Orang	29.694.000	Trw 1 : 25.535.400	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
						Trw 2 : 150 orang	Trw 2 : 197 Orang	43.179.000	Trw 2 : 37.765.400	
						Trw 3 : 300 orang	Trw 3 : 197 Orang	43.179.000	Trw 3 : 37.765.400	
						Trw 4 : 500 orang	Trw 4 : 746 Orang	60.838.000	Trw 4 : 60.453.456	
				Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan Dasar kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 250 orang	Trw 1 : 668 Orang	-	Trw 1 : -	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Trw 2 : 500 orang	Trw 2 : 1205 Orang	7.070.000	Trw 2 : 4.570.000	
						Trw 3 : 750 orang	Trw 3 : 1280 Orang	7.250.000	Trw 3 : 4.570.000	
						Trw 4 : 1000 orang	Trw 4 : 1345 Orang	11.500.000	Trw 4 : 11.435.000	
10			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 100 orang	Trw 1 : 163 Orang	1.250.000	Trw 1 : 1.250.000	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Trw 2 : 250 orang	Trw 2 : 339 Orang	13.343.000	Trw 2 : 8.617.400	
						Trw 3 : 450 orang	Trw 3 : 483 Orang	13.343.000	Trw 3 : 9.947.400	
						Trw 4 : 550 orang	Trw 4 : 610 Orang	13.343.000	Trw 4 : 13.317.400	
				Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 10 orang	Trw 1 : 9 Orang	5.200.000	Trw 1 : -	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Trw 2 : 20 orang	Trw 2 : 17 Orang	41.733.000	Trw 2 : 26.526.000	
						Trw 3 : 50 Orang	Trw 3 : 97 Orang	46.463.000	Trw 3 : 26.526.000	
						Trw 4 : 1000 orang	Trw 4 : 1000 orang	243.443.000	Trw 4 : 243.030.500	

				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 90 orang	Trw 1 : 90 orang	Trw 1 : 4.850.000	Trw 1 : -	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Trw 2 : 90 orang	Trw 2 : 90 orang	Trw 2 : 30.612.000	Trw 2 : -	
						Trw 3 : 90 orang	Trw 3 : 90 orang	Trw 3 : 64.846.000	Trw 3 : 44.725.350	
						Trw 4 : 90 orang	Trw 4 : 90 orang	Trw 4 : 65.446.000	Trw 4 : 63.379.350	
				Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Trw 1 : 25.000 orang	Trw 1 : 28458 Orang	Trw 1 : 32.000.000	Trw 1 : 31.662.000	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
						Trw 2 : 25.000 orang	Trw 2 : 28458 Orang	Trw 2 : 232.838.000	Trw 2 : 81.725.000	
						Trw 3 : 25.000 orang	Trw 3 : 28458 Orang	Trw 3 : 246.338.000	Trw 3 : 243.590.000	
						Trw 4 : 25.000 orang	Trw 4 : 28674 Orang	Trw 4 : 325.063.000	Trw 4 : 324.725.000	
				Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Trw 1 : 15.000 orang	Trw 1 : 15245 Orang	Trw 1 : 93.234.000	Trw 1 : 59.286.000	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
						Trw 2 : 15.000 orang	Trw 2 : 15245 Orang	Trw 2 : 206.296.000	Trw 2 : 140.261.350	
						Trw 3 : 15.000 orang	Trw 3 : 15245 Orang	Trw 3 : 286.322.000	Trw 3 : 254.769.350	
						Trw 4 : 15.000 orang	Trw 4 : 14701 Orang	Trw 4 : 363.080.000	Trw 4 : 357.641.350	
11	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Trw 1 : 0 Orang	Trw 1 : 0 Orang	Trw 1 : 800.000	Trw 1 : -	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Trw 2 : 0 Orang	Trw 2 : 0 Orang	Trw 2 : 52.288.000	Trw 2 : 21.890.900	
						Trw 3 : 0 Orang	Trw 3 : 0 Orang	Trw 3 : 55.288.000	Trw 3 : 42.247.400	
						Trw 4 : 124151 Orang	Trw 4 : 197150 Orang	Trw 4 : 55.288.000	Trw 4 : 55.282.400	
12	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 60 Orang	Trw 1 : 67 Orang	Trw 1 : 46.075.000	Trw 1 : 15.030.350	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Trw 2 : 100 Orang	Trw 2 : 92 Orang	Trw 2 : 84.635.000	Trw 2 : 36.054.350	
						Trw 3 : 200 Orang	Trw 3 : 311 Orang	Trw 3 : 101.705.000	Trw 3 : 86.446.350	
						Trw 4 : 200 Orang	Trw 4 : 344 Orang	Trw 4 : 123.385.000	Trw 4 : 120.355.850	
				Tersedianya tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Trw 1 : 8.200.000	Trw 1 : -	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
						Trw 2 : -	Trw 2 : -	Trw 2 : 25.540.000	Trw 2 : -	
						Trw 3 : 2 Unit	Trw 3 : 2 Unit	Trw 3 : 40.940.000	Trw 3 : 10.610.000	
						Trw 4 : 2 Unit	Trw 4 : 2 Unit	Trw 4 : 40.940.000	Trw 4 : 40.170.000	
13	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional	Trw 1 : 1 Dokumen	Trw 1 : 1 Dokumen	Trw 1 : 55.084.462	Trw 1 : 59.037.000	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
						Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 109.240.046	Trw 2 : 102.684.000	
						Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 127.850.046	Trw 3 : 119.335.000	
						Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 130.850.046	Trw 4 : 130.830.000	

Liwa, 7 Januari 2026  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



**ALIYURDIN, S.Sos.,M.H**

NIP. 19721120 199402 1 002

**Rencana Aksi Tingkat Sub Kegiatan Diatas Sosial**  
**Periode 2023-2026**  
**Tahun 2025**

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan	Kinerja Per triwulan Akumulatif		Keuangan Per triwulan Akumulatif		Nama Jabatan Penanggung Jawab
							Target	Realisasi	Target (Rp)	Realisasi	
1	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 : 4 Dokumen	Trw 1 : 4 Dokumen	Trw 1 : 6.775.000	Trw 1 : 4.800.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 4 Dokumen	Trw 2 : 4 Dokumen	Trw 2 : 6.775.000	Trw 2 : 6.775.000	
							Trw 3 : 4 Dokumen	Trw 3 : 4 Dokumen	Trw 3 : 6.775.000	Trw 3 : 6.775.000	
							Trw 4 : 4 Dokumen	Trw 4 : 4 Dokumen	Trw 4 : 21.839.000	Trw 4 : 21.671.000	
2	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 0 Dokumen	Trw 2 : 0 Dokumen	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
							Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : -	Trw 3 : -	
							Trw 4 : 2 Dokumen	Trw 4 : 2 Dokumen	Trw 4 : 4.385.000	Trw 4 : 4.385.000	
3	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
							Trw 3 : 2 Dokumen	Trw 3 : 2 Dokumen	Trw 3 : 7.775.000	Trw 3 : 7.775.000	
							Trw 4 : 2 Dokumen	Trw 4 : 2 Dokumen	Trw 4 : 7.775.000	Trw 4 : 7.775.000	
4	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Tersedianya dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 0 Dokumen	Trw 2 : 0 Dokumen	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
							Trw 3 : 0 Dokumen	Trw 3 : 0 Dokumen	Trw 3 : -	Trw 3 : -	
							Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 5.430.000	Trw 4 : 5.430.000	
5	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : 0 Dokumen	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 0 Dokumen	Trw 2 : 0 Dokumen	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
							Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 5.445.000	Trw 3 : 5.445.000	
							Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 5.445.000	Trw 4 : 5.445.000	
6	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Trw 1 : 1 Laporan	Trw 1 : 1 Laporan	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 2 Laporan	Trw 2 : 2 Laporan	Trw 2 : -	Trw 2 : -	
							Trw 3 : 3 Laporan	Trw 3 : 3 Laporan	Trw 3 : -	Trw 3 : -	
							Trw 4 : 4 Laporan	Trw 4 : 4 Laporan	Trw 4 : 3.465.000	Trw 4 : 3.465.000	
7	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 : 10 Laporan	Trw 1 : 10 Laporan	Trw 1 : 5.300.000	Trw 1 : 3.000.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 10 Laporan	Trw 2 : 10 Laporan	Trw 2 : 5.300.000	Trw 2 : 5.300.000	
							Trw 3 : 10 Laporan	Trw 3 : 10 Laporan	Trw 3 : 5.300.000	Trw 3 : 5.300.000	
							Trw 4 : 10 Laporan	Trw 4 : 10 Laporan	Trw 4 : 5.300.000	Trw 4 : 5.300.000	
8	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Trw 1 : 25 Orang	Trw 1 : 25 Orang	Trw 1 : 773.713.612	Trw 1 : 686.286.596	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
							Trw 2 : 28 Orang	Trw 2 : 28 Orang	Trw 2 : 1.599.900.421	Trw 2 : 1.409.295.154	
							Trw 3 : 28 Orang	Trw 3 : 28 Orang	Trw 3 : 2.217.540.527	Trw 3 : 1.982.594.227	

							Trw 4 : 28 Orang	Trw 4 : 28 Orang	Trw 4 : 2.744.465.641	Trw 4 : 2.600.618.364	
9	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 : 0 Laporan Trw 2 : 0 Laporan Trw 3 : 0 Laporan Trw 4 : 1 Laporan	Trw 1 : 0 Laporan Trw 2 : 0 Laporan Trw 3 : 0 Laporan Trw 4 : 1 Laporan	Trw 1 : Trw 2 : Trw 3 : Trw 4 : 3.000.000	Trw 1 : Trw 2 : Trw 3 : Trw 4 : 3.000.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
10	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 1 : 0 Laporan Trw 2 : 1 Laporan Trw 3 : 1 Laporan Trw 4 : 2 Laporan	Trw 1 : 0 Laporan Trw 2 : 1 Laporan Trw 3 : 1 Laporan Trw 4 : 2 Laporan	Trw 1 : 2.465.000 Trw 2 : 2.465.000 Trw 3 : 2.465.000 Trw 4 : 2.465.000	Trw 1 : 1.800.000 Trw 2 : 1.800.000 Trw 3 : 1.800.000 Trw 4 : 2.465.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
11	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 : 0 Dokumen Trw 2 : 1 Dokumen Trw 3 : 1 Dokumen Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 1 : 0 Dokumen Trw 2 : 1 Dokumen Trw 3 : 1 Dokumen Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 1 : Trw 2 : 2.505.000 Trw 3 : 2.505.000 Trw 4 : 2.505.000	Trw 1 : Trw 2 : Trw 3 : 2.505.000 Trw 4 : 2.505.000	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda
12	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Mibik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 : 1 Dokumen Trw 2 : 1 Dokumen Trw 3 : 1 Dokumen Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 1 : 1 Dokumen Trw 2 : 1 Dokumen Trw 3 : 1 Dokumen Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 1 : 5.085.000 Trw 2 : 8.545.000 Trw 3 : 8.545.000 Trw 4 : 8.545.000	Trw 1 : 3.200.000 Trw 2 : 5.085.000 Trw 3 : 5.085.000 Trw 4 : 8.545.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
13	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 : 1 Dokumen Trw 2 : 1 Dokumen Trw 3 : 1 Dokumen Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 1 : 1 Dokumen Trw 2 : 1 Dokumen Trw 3 : 1 Dokumen Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 1 : Trw 2 : Trw 3 : Trw 4 : 3.366.000	Trw 1 : Trw 2 : Trw 3 : Trw 4 : 3.366.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
14	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Trw 1 : 0 Orang Trw 2 : 0 Orang Trw 3 : 0 Orang Trw 4 : 2 Orang	Trw 1 : 0 Orang Trw 2 : 0 Orang Trw 3 : 0 Orang Trw 4 : 2 Orang	Trw 1 : Trw 2 : Trw 3 : Trw 4 : 10.000.000	Trw 1 : Trw 2 : Trw 3 : Trw 4 : 10.000.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
15	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Trw 1 : 1 Paket Trw 2 : 1 Paket Trw 3 : 1 Paket Trw 4 : 1 Paket	Trw 1 : 1 Paket Trw 2 : 1 Paket Trw 3 : 1 Paket Trw 4 : 1 Paket	Trw 1 : 7.938.000 Trw 2 : 7.938.000 Trw 3 : 7.938.000 Trw 4 : 7.938.000	Trw 1 : 7.938.000 Trw 2 : 7.938.000 Trw 3 : 7.938.000 Trw 4 : 7.938.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan
16	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Trw 1 : 3 Paket Trw 2 : 6 Paket Trw 3 : 9 Paket	Trw 1 : 3 Paket Trw 2 : 6 Paket Trw 3 : 9 Paket	Trw 1 : 10.445.000 Trw 2 : 15.097.000 Trw 3 : 24.097.000	Trw 1 : 10.445.000 Trw 2 : 15.097.000 Trw 3 : 24.097.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan



							Trw 4 : 12 Paket	Trw 4 : 12 Paket	Trw 4 :	30.231.000	Trw 4 :	30.231.000		
17	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Trw 1 : 8 Dokumen	Trw 1 : 8 Dokumen	Trw 1 :	5.015.000	Trw 1 :	3.015.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 : 8 Dokumen	Trw 2 : 8 Dokumen	Trw 2 :	6.030.000	Trw 2 :	6.030.000		
							Trw 3 : 8 Dokumen	Trw 3 : 8 Dokumen	Trw 3 :	9.045.000	Trw 3 :	9.045.000		
							Trw 4 : 8 Dokumen	Trw 4 : 8 Dokumen	Trw 4 :	12.060.000	Trw 4 :	12.060.000		
18	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 :	1.135.000	Trw 1 :	1.135.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 :	2.927.000	Trw 2 :	2.927.000		
							Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 :	4.763.000	Trw 3 :	4.763.000		
							Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 :	6.950.000	Trw 4 :	6.950.000		
19	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 :	48.945.000	Trw 1 :	26.316.953	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 :	75.104.000	Trw 2 :	61.255.531		
							Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 :	75.104.000	Trw 3 :	74.165.531		
							Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 :	143.919.000	Trw 4 :	143.876.626		
20	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	Trw 1 : 4 Unit	Trw 1 : 4 Unit	Trw 1 :	6.800.000	Trw 1 :	6.800.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 : 4 Unit	Trw 2 : 4 Unit	Trw 2 :	6.800.000	Trw 2 :	6.800.000		
							Trw 3 : 4 Unit	Trw 3 : 4 Unit	Trw 3 :	6.800.000	Trw 3 :	6.800.000		
							Trw 4 : 4 Unit	Trw 4 : 4 Unit	Trw 4 :	6.800.000	Trw 4 :	6.800.000		
21	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Trw 1 : 2 Unit	Trw 1 : 2 Unit	Trw 1 :	26.000.000	Trw 1 :	26.000.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 : 2 Unit	Trw 2 : 2 Unit	Trw 2 :	26.000.000	Trw 2 :	26.000.000		
							Trw 3 : 2 Unit	Trw 3 : 2 Unit	Trw 3 :	26.000.000	Trw 3 :	26.000.000		
							Trw 4 : 2 Unit	Trw 4 : 2 Unit	Trw 4 :	26.000.000	Trw 4 :	26.000.000		
22	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 :	2.000.000	Trw 1 :	2.000.000	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 :	4.000.000	Trw 2 :	4.000.000		
							Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 :	4.000.000	Trw 3 :	4.000.000		
							Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 :	5.000.000	Trw 4 :	5.000.000		
23	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 :	13.140.000	Trw 1 :	5.512.870	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 :	26.280.000	Trw 2 :	15.431.510		
							Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 :	39.420.000	Trw 3 :	25.340.092		
							Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 :	36.555.000	Trw 4 :	34.306.383		
24	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 : 3 Laporan	Trw 1 :	6.852.100	Trw 1 :	6.582.100	Kasubbag Umum dan Perencanaan	
							Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 : 6 Laporan	Trw 2 :	25.503.000	Trw 2 :	23.248.900		
							Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 : 9 Laporan	Trw 3 :	31.353.000	Trw 3 :	28.828.900		
							Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 : 12 Laporan	Trw 4 :	41.663.000	Trw 4 :	40.573.000		

25	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan	Trw 1 : 3 unit	Trw 1 : 3 unit	Trw 1 : 34.525.000	Trw 1 : 33.631.221	Kasubag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 5 unit	Trw 2 : 5 unit	87.887.500	Trw 2 : 52.638.229	
							Trw 3 : 27 unit	Trw 3 : 27 unit	112.250.000	Trw 3 : 105.709.972	
							Trw 4 : 36 unit	Trw 4 : 36 unit	116.750.000	Trw 4 : 111.032.172	
26	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan: Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Trw 1 : 5 unit	Trw 1 : 5 unit	3.650.000	Trw 1 : -	Kasubag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 7 unit	Trw 2 : 7 unit	5.820.000	Trw 2 : 4.340.000	
							Trw 3 : 9 unit	Trw 3 : 9 unit	7.990.000	Trw 3 : 7.970.000	
							Trw 4 : 14 unit	Trw 4 : 14 unit	10.160.000	Trw 4 : 10.160.000	
27	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara /durehabilitasi	Trw 1 : 1 Unit	Trw 1 : 1 Unit	3.450.000	Trw 1 : -	Kasubag Umum dan Perencanaan
							Trw 2 : 1 Unit	Trw 2 : 1 Unit	3.450.000	Trw 2 : 3.450.000	
							Trw 3 : 1 Unit	Trw 3 : 1 Unit	3.450.000	Trw 3 : 3.450.000	
							Trw 4 : 1 Unit	Trw 4 : 1 Unit	3.450.000	Trw 4 : 3.450.000	
28	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kabupaten/kota	Trw 1 : 8 orang	Trw 1 : 8 orang	59.800.000	Trw 1 : 14.082.000	Fngsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 8 orang	Trw 2 : 8 orang	179.462.000	Trw 2 : 139.235.000	
							Trw 3 : 8 orang	Trw 3 : 8 orang	179.462.000	Trw 3 : 177.635.000	
							Trw 4 : 8 orang	Trw 4 : 8 orang	179.462.000	Trw 4 : 179.369.000	
29	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kabupaten/Kota	Trw 1 : 150 orang	Trw 1 : 197 Orang	29.694.000	Trw 1 : 25.535.400	Fngsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 150 orang	Trw 2 : 197 Orang	43.179.000	Trw 2 : 37.765.400	
							Trw 3 : 300 orang	Trw 3 : 197 Orang	43.179.000	Trw 3 : 37.765.400	
							Trw 4 : 500 orang	Trw 4 : 746 Orang	60.838.000	Trw 4 : 60.453.456	
30	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kabupaten/Kota	Trw 1 : 250 orang	Trw 1 : 668 Orang	-	Trw 1 : -	Fngsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 500 orang	Trw 2 : 1205 Orang	7.070.000	Trw 2 : 4.570.000	
							Trw 3 : 750 orang	Trw 3 : 1280 Orang	7.250.000	Trw 3 : 4.570.000	
							Trw 4 : 1000 orang	Trw 4 : 1345 Orang	11.500.000	Trw 4 : 11.435.000	
31	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 100 orang	Trw 1 : 163 Orang	1.250.000	Trw 1 : 1.250.000	Fngsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 250 orang	Trw 2 : 339 Orang	13.343.000	Trw 2 : 8.617.400	
							Trw 3 : 450 orang	Trw 3 : 483 Orang	13.343.000	Trw 3 : 9.947.400	
							Trw 4 : 550 orang	Trw 4 : 610 Orang	13.343.000	Trw 4 : 13.317.400	
32	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 10 orang	Trw 1 : 9 Orang	5.200.000	Trw 1 : -	Fngsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 20 orang	Trw 2 : 17 Orang	41.733.000	Trw 2 : 26.526.000	

			Sosial				Trw 3 : 50 Orang	Trw 3 : 97 Orang	Trw 3 : 46.463.000	Trw 3 : 26.526.000	
							Trw 4 : 1000 orang	Trw 4 : 1000 orang	Trw 4 : 243.443.000	Trw 4 : 243.030.500	
33	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantu Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kabupaten/kota	Trw 1 : 90 orang	Trw 1 : 90 orang	Trw 1 : 4.850.000	Trw 1 : -	Fngsional Pekerja Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 90 orang	Trw 2 : 90 orang	Trw 2 : 30.612.000	Trw 2 : -	
							Trw 3 : 90 orang	Trw 3 : 90 orang	Trw 3 : 64.846.000	Trw 3 : 44.725.350	
							Trw 4 : 90 orang	Trw 4 : 90 orang	Trw 4 : 65.446.000	Trw 4 : 65.379.350	
34	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantu Sosial	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Trw 1 : 25.000 orang	Trw 1 : 28+58 Orang	Trw 1 : 32.000.000	Trw 1 : 31.662.000	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
							Trw 2 : 25.000 orang	Trw 2 : 28+58 Orang	Trw 2 : 232.838.000	Trw 2 : 81.725.000	
							Trw 3 : 25.000 orang	Trw 3 : 28+58 Orang	Trw 3 : 246.338.000	Trw 3 : 243.590.000	
							Trw 4 : 25.000 orang	Trw 4 : 28674 Orang	Trw 4 : 325.053.000	Trw 4 : 324.725.000	
35	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantu Sosial	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Trw 1 : 15.000 orang	Trw 1 : 15245 Orang	Trw 1 : 93.234.000	Trw 1 : 59.286.000	Fngsional Penyuluh Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 15.000 orang	Trw 2 : 15245 Orang	Trw 2 : 206.296.000	Trw 2 : 140.261.350	
							Trw 3 : 15.000 orang	Trw 3 : 15245 Orang	Trw 3 : 286.322.000	Trw 3 : 254.769.350	
							Trw 4 : 15.000 orang	Trw 4 : 14701 Orang	Trw 4 : 363.080.000	Trw 4 : 357.641.350	
36	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	Trw 1 : 0 Orang	Trw 1 : 0 Orang	Trw 1 : 800.000	Trw 1 : -	Fngsional Pekerja Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 0 Orang	Trw 2 : 0 Orang	Trw 2 : 52.288.000	Trw 2 : 21.890.900	
							Trw 3 : 0 Orang	Trw 3 : 0 Orang	Trw 3 : 55.288.000	Trw 3 : 42.247.400	
							Trw 4 : 12+151 Orang	Trw 4 : 197150 Orang	Trw 4 : 55.288.000	Trw 4 : 55.282.400	
37	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : 60 Orang	Trw 1 : 67 Orang	Trw 1 : 46.075.000	Trw 1 : 15.030.350	Fngsional Pekerja Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : 100 Orang	Trw 2 : 92 Orang	Trw 2 : 84.635.000	Trw 2 : 36.054.350	
							Trw 3 : 200 Orang	Trw 3 : 311 Orang	Trw 3 : 101.705.000	Trw 3 : 86.446.350	
							Trw 4 : 200 Orang	Trw 4 : 344 Orang	Trw 4 : 123.385.000	Trw 4 : 120.355.850	
38	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/kota	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersejadinya tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	Trw 1 : -	Trw 1 : -	Trw 1 : 8.200.000	Trw 1 : -	Fngsional Pekerja Sosial Ahli Muda
							Trw 2 : -	Trw 2 : -	Trw 2 : 25.540.000	Trw 2 : -	
							Trw 3 : 2 Unit	Trw 3 : 2 Unit	Trw 3 : 40.940.000	Trw 3 : 10.610.000	
							Trw 4 : 2 Unit	Trw 4 : 2 Unit	Trw 4 : 40.940.000	Trw 4 : 40.170.000	

39	Meningkatnya PMKS yang berdaya	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Trw 1 : 1 Dokumen	Trw 1 : 1 Dokumen	Trw 1 : 55.084.462	Trw 1 : 59.037.000	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda
							Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 1 Dokumen	Trw 2 : 109.240.046	Trw 2 : 102.684.000	
							Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 1 Dokumen	Trw 3 : 127.850.046	Trw 3 : 119.335.000	
							Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 1 Dokumen	Trw 4 : 130.850.046	Trw 4 : 130.830.000	


  
 Liwa, 21 Januari 2026  
 KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
  
**ALIYURDIN, S.Sos., M.H**  
 NIP. 19721120 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PAROSIL MABSUS  
Jabatan : Bupati Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 27 Oktober 2025

Bupati Lampung Barat  
Pihak Kedua,  
  
  
PAROSIL MABSUS

Pihak Pertama,  
  
  
ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
PEMBINA TK I /IV.b  
NIP. 19721120 199402 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI	TARGET
(1)	(2)	(3)		
1	Meningkatnya PMKS yang Berdaya	Persentase Peningkatan PMKS yang Berdaya	(Presentase Disabilitas Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti + Presentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana)	91.73%

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kabupaten/Kota</b>	<b>3.275.461.641</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.639.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :	21.839.000	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD :	4.385.000	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD :	7.775.000	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD :	5.430.000	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD :	5.445.000	APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD :	3.465.000	APBD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :	5.300.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.752.435.641	

<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	:	2.744.465.641	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	:	3.000.000	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan /	:	2.465.000	APBD
4 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran	:	2.505.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Admisnitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		8.545.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	:	8.545.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Admisnitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		13.366.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	:	3.366.000	APBD
2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	:	10.000.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Admisnitrasi Umum perangkat Daerah		201.098.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor	:	7.938.000	APBD
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	:	30.231.000	APBD
4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	:	12.060.000	APBD
5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	:	6.950.000	APBD
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	143.919.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		32.800.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Pengadaan Mebelcur	:	6.800.000	APBD
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	26.000.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah		83.218.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	5.000.000	APBD
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	:	36.555.000	APBD
3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	:	41.663.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		130.360.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			

1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	:	116.750.000	APBD
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	:	10.160.000	APBD
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	:	3.450.000	APBD
<b>2</b>	<b>Rehabilitasi Sosial</b>	:	<b>1.262.175.000</b>	
	<b>Kegiatan</b>			
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial		251.800.000	
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	:	179.462.000	APBD
2	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	:	60.838.000	APBD
3	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	:	11.500.000	APBD
	<b>Kegiatan</b>			
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial		1.010.375.000	
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	:	13.343.000	APBD
2	Penyediaan Permakanan	:	243.443.000	APBD
3	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	:	65.446.000	APBD
4	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	:	325.063.000	APBD
5	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	:	363.080.000	APBD
<b>3</b>	<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	:	<b>55.288.000</b>	
	<b>Kegiatan</b>			
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	:	55.288.000	
	<b>Sub Kegiatan</b>			
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	:	55.288.000	APBD
<b>4</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	:	<b>164.325.000</b>	
	<b>Kegiatan</b>			
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	:	164.325.000	



<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan Makanan	:	123.385.000	APBD
2 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	:	40.940.000	APBD
<b>4 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Kegiatan</b>	:	<b>130.850.046</b>	
Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	:	130.850.046	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	:	130.850.046	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	:	<b>4.888.099.687</b>	

Liwa, 27 Oktober 2025


  
 BUPATI LAMPUNG BARAT,  
  
 PAROSIL MABSUS


  
 KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  
  
 ANIYURDIN, S.Sos., M.H  
 Pembina TK I/ IV.b  
 NIP. 19721120 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferri Istanto, S.E.,M.M  
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 27 Oktober 2025



Pihak Kedua,

ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
PEMBINA TK I /IV.b  
NIP. 19721120 199402 1 002

Pihak Pertama,

Ferri Istanto, S.E.,M.M  
PEMBINA /IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.95%

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kabupaten/Kota</b>	<b>3.275.461.641</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.639.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :	21.839.000	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- :	4.385.000	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD :	7.775.000	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD :	5.430.000	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD :	5.445.000	APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi :	3.465.000	APBD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :	5.300.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.752.435.641	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :	2.744.465.641	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan laporan :	3.000.000	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / :	2.465.000	APBD
4 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran :	2.505.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Admisnitrası Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.545.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD :	8.545.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Admisnitrası Kepegawaian Perangkat Daerah	13.366.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai :	3.366.000	APBD
2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI :	10.000.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		

Admisnitasi Umum perangkat Daerah	:	201.098.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan Komponen instalasi	:	7.938.000	APBD
3 Penyediaan barang cetakan dan	:	30.231.000	APBD
4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	:	12.060.000	APBD
5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	:	6.950.000	APBD
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	143.919.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	:	32.800.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Pengadaan Mebeleur	:	6.800.000	APBD
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	26.000.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	:	83.218.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	5.000.000	APBD
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	:	36.555.000	APBD
3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	:	41.663.000	APBD
<b>Kegiatan</b>			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	:	130.360.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya	:	116.750.000	APBD
2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	:	10.160.000	APBD
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor	:	3.450.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	:	<b>3.275.461.641</b>	

Liwa, 27 Oktober 2025

Pih. SEKRETARIS,

FERRI ISTANTO, SE.MM

Pembina /IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RIDA WIDYATIN, S.IP  
Jabatan : Analis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FERRI ISTANTO, S.E.,M.M  
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ferri Istanto, S.E.,M.M  
PEMBINA /IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,

RIDA WIDYATIN, S.IP.  
PENATA Tk I/III.d  
NIP. 19800325 200212 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	28 orang
2	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
3	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	2 Laporan
4	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kabupaten/Kota</b>	<b>2.752.435.641</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.752.435.641	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN :	2.744.465.641	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD :	3.000.000	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD :	2.465.000	APBD
4 Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran :	2.505.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b> :	<b>2.752.435.641</b>	

Liwa, 27 Oktober 2025


  
 PIB. SEKRETARIS,  
**FERRI ISTANTO, SE.MM**  
 Pembina / IV.a  
 NIP. 19760614 200003 1 001

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda

  
**RIDA WIDYATIN, S.IP**  
 Penata TK I / III.d  
 NIP. 19800325 200212 2 006



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SLAMET SUTONO, S.I.P.,M.PH  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Perencanaan Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FERRI ISTANTO, S.E.,M.M  
Jabatan : Plh. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Ferri Istanto, S.E.,M.M  
PEMBINA /IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,

SLAMET SUTONO, S.I.P.,M.PH  
PENATA TK I/III.d  
NIP. 19801226 200701 1 002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
2	Tersedianya dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Tersedianya dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen
4	Tersedianya dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen
5	Tersedianya dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan
7	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan
8	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen
9	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen
10	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 Orang
11	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang disediakan	1 Paket
12	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	12 Paket
13	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	8 dokumen
14	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan
15	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
16	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang di sediakan	4 Unit
17	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	2 Unit
18	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
19	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan



20	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan
21	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36 Unit
22	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	20 Unit
23	Terlaksananya Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	1 Unit

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Penunjang Urusan Pemerintah Daerah : Kabupaten/Kota</b>	<b>523.026.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.639.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah :	21.839.000	APBD
2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD :	4.385.000	APBD
3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen :	7.775.000	APBD
4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD :	5.430.000	APBD
5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD :	5.445.000	APBD
6 Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD :	3.465.000	APBD
7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :	5.300.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Admisitrasi Barang Milik Daerah pada	8.545.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD :	8.545.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Admisitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.366.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai :	3.366.000	APBD
2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI :	10.000.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Admisitrasi Umum perangkat Daerah	201.098.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyediaan Komponen instalasi listrik/Penerangan bangunan kantor :	7.938.000	APBD
3 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan :	30.231.000	APBD
4 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan :	12.060.000	APBD

5 Fasilitasi Kunjungan Tamu	:	6.950.000	APBD
6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	:	143.919.000	APBD

**Kegiatan**

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 32.800.000

**Sub Kegiatan**

1 Pengadaan Mebeleur	:	6.800.000	APBD
2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	:	26.000.000	APBD

**Kegiatan**

Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah 83.218.000

**Sub Kegiatan**

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	:	5.000.000	APBD
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	:	36.555.000	APBD
3 Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	:	41.663.000	APBD

**Kegiatan**

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 130.360.000

**Sub Kegiatan**

1 Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	:	116.750.000	APBD
2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	:	10.160.000	APBD
3 Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	:	3.450.000	APBD

**Jumlah Anggaran**

:

**523.026.000**

  
 Plh. SEKRETARIS  
FERRI ISTANTO, SE., M.M  
 Pembina /IV.a  
 NIP. 19760614 200003 1 001

Liwa, 27 Oktober 2025

KEPALA SUB BAGIAN  
UMUM DAN PERENCANAAN,

  
SLAMET SUTONO, S.I.P., M.PH  
 Penata TK I/III.d  
 NIP. 19801226 200701 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : PATHAN, S.E.,M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
PEMBINA TK I /IV.b  
NIP. 19721120 199402 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,

PATHAN, S.E.,M.M  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 19770310 200604 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas	Persentase Penyandang disabilitas yang direhabilitasi	58.65%

	Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Rehabilitasi Sosial</b>	<b>:</b>	<b>240.300.000</b>	
	<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas : Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<b>:</b>	<b>240.300.000</b>	
	<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	<b>:</b>	179.462.000	APBD
2 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga : Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	<b>:</b>	60.838.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>:</b>	<b>240.300.000</b>	

  
 RLP, KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  
 ARIYULIDIN, S.Sos., M.H  
 Pembina Tk. I/ IV.b  
 NIP. 19721120 199402 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
 KEPALA BIDANG  
 REHABILITASI SOSIAL,  
  
 PATHAN, S.E., M.M  
 Pembina/IV.a  
 NIP. 19770310 200604 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KALPITORI, S.H.,M.M  
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PATHAN, S.E.,M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat


Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
  
PATHAN, S.E.,M.M  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 19770310 200604 1 003

Pihak Pertama,  
  
KALPITORI, S.H.,M.M  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 19740415 199402 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO (1)	SASARAN SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	550 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Rehabilitasi Sosial</b>	<b>60.838.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	60.838.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	60.838.000	
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>60.838.000</b>	

  
 KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL  
PATRIAN S.E., M.M  
 Pembina / IV.a  
 NIP. 19770310 200604 1 003

Liwa, 27 Oktober 2025  
 PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA  
  
KALPITORIS.H., M.M  
 PEMBINA / IV.a  
 NIP. 19740415 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HARYADI, S.H. MM.  
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : PATHAN, S.E.,M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 17 Oktober 2025

Pihak Kedua,  
  
PATHAN, S.E., M.M.

PEMBINA/IV.a  
NIP. 19770310 200604 1 003

Pihak Pertama,



HARYADI, S.H. M.M.  
PENATA TK I/III.d  
NIP. 19771211 200701 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	8 Orang

	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1 Rehabilitasi Sosial</b>	:	<b>179.462.000</b>	
<b>Kegiatan</b>			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas : Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	:	<b>179.462.000</b>	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	:	179.462.000	
<b>Jumlah Anggaran</b>	:	<b>179.462.000</b>	

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL



Liwa, 27 Oktober 2025  
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

HARYADI, SH. MM  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19771211 200701 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FERRI ISTANTO, SE.,M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 27 Oktober 2025



Pihak Kedua,

ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
PEMBINA TK I /IV.b  
NIP. 19721120 199402 1 002

Pihak Pertama,

FERRI ISTANTO, SE.M.M  
PEMBINA/ IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Optimalnya pemberian bantuan bagi korban bencana	Persentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang disampaikan dalam waktu kurang dari 3 hari setelah laporan diterima	100%
2	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13.23%

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>683.469.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.500.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	11.500.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	671.969.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyediaan Permakanan	243.443.000	APBD
2 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	65.446.000	APBD
3 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	363.080.000	APBD
<b>2 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>164.325.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	164.325.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyediaan Makanan	123.385.000	APBD
2 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	40.940.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>847.794.000</b>	

Liwa, 27 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN  
DAN JAMINAN SOSIAL

*Ferris*  
FERRI ISTANTO, SE.M.M

Pembina /IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001



ALYURDIN, S.Sos.,M.H  
Pembina TK I/ IV.b  
NIP. 19721120 199402 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDRIYANSYAH, SE.,M.M  
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : FERRI ISTANTO, S.E.,M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas  
Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



FERRI ISTANTO, SE.,M.M  
PEMBINA/ IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,

ANDRIYANSYAH, SE.,M.M  
PENATA TK I /III.d  
NIP. 19800628 201001 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

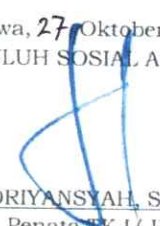
NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2 Unit

<b>1 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	:	<b>40.940.000</b>	
<b>Kegiatan</b>			
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota		40.940.000	
<b>Sub Kegiatan</b>			
1 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	:	40.940.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	:	<b>40.940.000</b>	

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN



Liwa, 27 Oktober 2025  
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

  
ANDRIYANSYAH, S.E., M.M  
 Penata TK I/ III.d  
 NIP. 19800628 201001 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DARYANTI, S.Pd.I  
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FERRI ISTANTO, SE.M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



FERRI ISTANTO, SE.MM  
PEMBINA/ IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,

DARYANTI, S.Pd.I  
PENATA TK.I/III.d  
NIP. 19820525 200501 2 016

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	1000 Orang
2	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang mendapatkan Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	15000 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>374.580.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	11.500.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	11.500.000	APBD
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	363.080.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	363.080.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>374.580.000</b>	

Liwa, 27 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,

PEKERJA SOSIAL AHLI MUDA

  
**FERRI ISTANTO, SE, MM**  
 Pembina /IV.a  
 NIP. 19760614 200003 1 001

  
**DARYANTI, S.Pd.i**  
 Penata TK.I /III.d  
 NIP. 19820525 200501 2 016



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUWARSYAH, S.IP.,M.M  
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FERRI ISTANTO, SE.,M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,



FERRI ISTANTO, SE., MM  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

JUWARSYAH, S.IP., MM  
PENATA TK I/III.d  
NIP. 19701010 200701 1 008

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, mental, spiritual, dan sosial kewenangan kabupaten/kota	90 Orang
2	Terpenuhinya Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Permakanan 3X1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	200 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>65.446.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	65.446.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	65.446.000	APBD
<b>2 PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>123.385.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	123.385.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyediaan Makanan	123.385.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>188.831.000</b>	

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN  
SOSIAL



Liwa, 27 Oktober 2025  
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

JUWARSYAH, S.I.P., M.M.  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19701010 200701 1 008





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EDWIN HERAWAN, S.E.,M.M  
Jabatan : Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial  
Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : FERRI ISTANTO, S.E.M.M  
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas  
Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



FERRI ISTANTO, S.E.M.M  
PEMBINA/ IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,

EDWIN HERAWAN, SE.,M.M  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 19680728 198903 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal kewenangan kabupaten/kota	1000 Orang

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Program Rehabilitasi Sosial</b>	<b>243.443.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	243.443.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Penyediaan Permakanan	243.443.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>243.443.000</b>	

KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL,



FERRI ISTANTO, SE. MM  
Pembina /IV.a  
NIP. 19760614 200003 1 001

Liwa, 27 Oktober 2025  
PENYULUH SOSIAL AHLI MUDA

EDWIN HERAWAN, S.E.,MM  
PEMBINA /IV.a  
NIP. 19680728 198903 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.ST  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ALIYURDIN, S.Sos.,M.H  
Jabatan : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 27 Oktober 2025



Pihak Kedua,  
ALMURDIN, S.Sos.,M.H  
PEMBINA TK I /IV.b  
NIP. 19721120 199402 1 002

Pihak Pertama,

RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.ST  
PEMBINA/IVa  
NIP. 19731220 199303 1 003


PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	% komponen utama taman makam pahlawan	78.57%
2.	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	13,23%
3.	Meningkatnya kualitas layanan rujukan terpadu	IKM	B

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Rehabilitasi Sosial</b>	<b>338.406.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	338.406.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	13.343.000	APBD
2 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	325.063.000	APBD
<b>2 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>55.288.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	55.288.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	55.288.000	APBD
<b>3 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>130.850.046</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	130.850.046	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	130.850.046	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>524.544.046</b>	

  
 PLT. KEPALA DINAS SOSIAL  
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT,  
ALIYUDDIN, S.Sos.,M.H  
 Pembina/IK I/ IV.b  
 NIP. 19721120 199402 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
 KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
 DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN,  
  
RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.ST  
 Pembina/IV.a  
 NIP. 19731220 199303 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MARTINA LENA, S.Ag.  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.ST  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Kedua,

  
RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.ST  
PEMBINA/IV.a  
NIP. 19731220 199303 1 003

Pihak Pertama,

  
MARTINA LENA, S.Ag  
PENATA TK I/III.d  
NIP. 19740308 200902 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025


NO (1)	SASARAN SUB KEGIATAN (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25000 Orang
2	Terlaksananya rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 dokumen

Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Rehabilitasi Sosial</b>	<b>325.063.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	325.063.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	325.063.000	APBD
<b>1 Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>130.850.046</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	130.850.046	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemeliharaan Taman Makam pahlawan nasional kabupaten/kota	130.850.046	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>455.913.046</b>	

Liwa, 27 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL  
PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI  
MUDA

PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI MUDA

  
**RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.ST**  
 Pembina/IV.a  
 NIP. 19731220 199303 1 003

  
**MARTINA LENA, S.Ag**  
 Penata TK I/III.d  
 NIP. 19740308 200902 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Teratai No.8 Way Mengaku Liwa 34811  
Telepon (0728) 21116 Fax. (0728) 21116

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALI AMAR, S.Pd  
Jabatan : Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda pada Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.ST  
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Kabupaten Lampung Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama pada Tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Liwa, 27 Oktober 2025

Pihak Pertama,

ALI AMAR, S.Pd  
PEMBINA/IV.a

NIP. 19690204 199501 1 001



Pihak Kedua,

RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.S.T  
PEMBINA/IV.a

NIP. 19731220 199303 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO.	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan kabupaten/Kota	550 Orang
1	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	1500 Orang


Program	Anggaran	Keterangan
<b>1 Rehabilitasi Sosial</b>	<b>13.343.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial	13.343.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	13.343.000	APBD
<b>1 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>55.288.000</b>	
<b>Kegiatan</b>		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	55.288.000	
<b>Sub Kegiatan</b>		
1 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	55.288.000	APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>	<b>68.631.000</b>	

Liwa, 27 Oktober 2025

KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN  
PENANGANAN FAKIR MISKIN,

PENGERAK SWADAYA MASYARAKAT AHLI  
MUDA

  
RADEN MULLAMMAD ARSYAD, S.ST  
 Pembina /IV.a  
 NIP. 19731220 199303 1 003

  
ALI AMAR, S.Pd  
 Pembina /IV.a  
 NIP. 19690204 199501 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Laporan LKPJ	Jumlah Laporan LKPj yang disusun	1 Laporan
2	Tersusunnya Laporan SPM Bidang Sosial	Jumlah Laporan SPM yang disusun	1 Laporan
3	Tersusunnya Laporan Evaluasi Rencana Aksi SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Rencana Aksi SKPD yang disusun	1 Laporan
4	Tersusunnya Laporan Evaluasi Renja SKPD	Jumlah Laporan Evaluasi Renja SKPD yang disusun	2 Laporan
5	Tersusunnya Laporan Lakip SKPD	Jumlah Laporan Lakip SKPD yang disusun	1 Laporan
6	Tersusunnya Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen
7	Menyiapkan Bahan Dokumen RKA Perangkat Daerah	Jumlah bahan dokumen RKA yang disiapkan	2 Dokumen
8	Menyiapkan Bahan Dokumen Perubahan RKA Perangkat Daerah	Jumlah bahan dokumen Perubahan RKA yang disiapkan	2 Dokumen
9	Menyiapkan Bahan Dokumen DPA Perangkat Daerah	Jumlah bahan dokumen DPA yang disiapkan	1 Dokumen
10	Menyiapkan Bahan Dokumen Perubahan DPA Perangkat Daerah	Jumlah bahan dokumen Perubahan DPA yang disiapkan	1 Dokumen
11	Tersusunnya Dokumen Renja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Renja yang disusun	2 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan



**SLAMET SUTONO, S.I.P., M.P.H**  
Penata T.K I/III.d  
NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Perencana Ahli Pertama



**ADI SAPUTRA PRATAMA, S.S.T**  
Penata Muda TK.I/III.b  
NIP. 199504232019031002

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan
2	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan
3	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	26 Orang
4	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan



Slamet Sutono, S.I.P., M.P.H  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Pengadministrasi Kepegawaian


NURMINA, S.E  
Penata Muda TK. 1/ III.b  
NIP. 19810217 201001 2002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyediakan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36 Unit
2	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bahan Pelaksanaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20 Unit
3	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bahan Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di pelihara/direhabilitasi	2 Unit
4	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan



**SLAMET SUJONG, S.I.P., M.P.H**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Analis Perencanaan Anggaran



**RUSLANI, S.I.P**  
Penata Tk. 1/III.d  
NIP. 19730303 200701 1 011

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

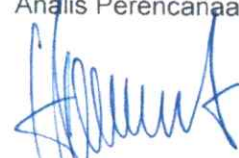
NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	1 Paket
2	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan
3	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan



SLAMET SUTONO, S.I.P., M.P.H  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Analis Perencanaan



KARSUM, S.I.P  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19730716 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH


OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12 Paket
2	Menyiapkan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disiapkan	8 Dokumen
3	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan

  
**SLAMET SUTONO, S.I.P., M.P.H**  
 Penata TK I/III.d  
 NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Pemandu Wisata

  
**AAN SUJAWADI**  
 Pengatur Tk.1/II.d  
 NIP. 197904152010011003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan dan Menyusun Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Bahan Penyusunan dan Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
2	Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan
3	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan dan Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	12 Laporan
4	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan

  
**SLAMET SUTONO, S.I.P., M.P.H**  
 Penata TK I/III.d  
 NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial

  
**RIKO ARNANDO, S.Sos**  
 Penata Muda /III.a  
 NIP. 19960404 202203 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025


NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu Menyiapkan Dokumen dan Laporan Hasil Pengadaan Mebel	Jumlah Dokumen Paket Mebel yang di sediakan	2 Dokumen
2	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan dan Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan
2	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan



**SLAMET SUTONO, S.I.P., M.P.H**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Pengadministrasi Perkantoran



**YENI UMI KHOLIFAH**  
Gol. V  
NIP. 19950406 202521 2 026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Fungsional Bulanan	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan Fungsional	12 laporan
2	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan SPP Pengajuan GU	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Pembuatan SPP Pengajuan GU	12 Dokumen
3	Melaksanakan Kegiatan Pemungutan dan Penyetoran Pajak	Jumlah Pemungutan dan Penyetoran Pajak	12 Laporan
4	Melaksanakan Kegiatan Penerimaan, Penatausahaan, dan Pembukuan Uang atau Surat Berharga	Jumlah Penerimaan, Penatausahaan, dan Pembukuan Uang atau Surat Berharga	12 Laporan

  
Plh. Sekretaris  
**FERRI ISTANTO, S.E., M.M**  
Pembina/IV.a  
NIP. 197606142000031001

Liwa, 27 Oktober 2025  
Bendahara  
  
**Misdariah, S.I.P**  
Penata /III.c  
NIP. 19800415 200701 2 007



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan PMKS dan PSKS	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan PMKS	1 Laporan
2	Menyiapkan Bahan Laporan Pendataan Fakir Miskin	Jumlah Laporan Pendataan Fakir Miskin yang disusun	1 Laporan
3	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan  
Fakir Miskin

  
RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.S.T  
Penata TK I/III.d  
NIP. 197312201993031003

Liwa, 27 Oktober 2025

Analisis Objek Wisata



ERNAWATI, S.E.  
Penata Muda Tk. I /III.b  
NIP. 197706102008012019

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH**

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu Melaksanakan kegiatan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	1 dokumen
2	Membantu menyiapkan Bahan Laporan Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25000
4	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan  
Fakir Miskin



**RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.S.T**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 197312201993031003

Liwa, 27 Oktober 2025  
Pranata Komputer Ahli Pertama

**DESI HARYANI, S.Kom**  
Golongan IX  
NIP. 198712272024212015

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan Penyusunan Laporan PMKS dan PSKS	Jumlah Bahan Penyusunan Laporan PMKS	1 Laporan
2	Membantu Melaksanakan kegiatan rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan nasional	Jumlah dokumen hasil rehabilitasi serta pemeliharaan sarana dan prasarana taman makam pahlawan	1 dokumen
3	Membantu menyiapkan Bahan Laporan Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	25000
4	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan  
Fakir Miskin



RADEN MUHAMMAD ARSYAD, S.S.T  
Penata TK I/III.d  
NIP. 197312201993031003

Liwa, 27 Oktober 2025

Pranata Komputer Ahli Pertama

DONI BRAWAN, S.kom  
Golongan IX  
NIP. 19931230 202421 1 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Menyiapkan Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Kerjasama Penanganan ODGJ	Jumlah Bahan Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Dokumen Kerjasama Penanganan ODGJ	2 dokumen
2	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kabid Rehabilitasi Sosial

  
PATHAN, S.E. M.M  
Pembina/IV.a  
NIP. 197703102006041003

Liwa, 27 Oktober 2025  
Pengadministrasi Rehabilitasi Masalah Sosial

  
MARDI  
Penata Muda /III.a  
NIP. 19680706 199903 1007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu Menyiapkan Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi AnggaranD	2 Dokumen
2	Membantu Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	12 Dokumen
3	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan



**SLAMET SUTONO, S.I.P., M.P.H**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Penata Layanan Operasional



**RINA RIANI, S.E**  
Gol. X  
NIP. 19941117 202521 2 026

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN  
TINGKAT PERANGKAT DAERAH

OPD : DINAS SOSIAL  
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Membantu Menyiapkan Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen
2	Menyiapkan Dokumen Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Dokumen Penyediaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 Dokumen
3	Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Kedinasan Lain yang Diberikan oleh Pimpinan Baik Lisan Maupun Tertulis	12 Dokumen

Kasubbag Umum dan Perencanaan



**SLAMET SUTONO, S.I.P., M.P.H**  
Penata TK I/III.d  
NIP. 19801226 200701 1 002

Liwa, 27 Oktober 2025  
Penata Layanan Operasional

**MERIA ASTUTI**  
Gol. X

NIP. 19850510 202521 2 036